



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

# LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Triwulan II



# 2022



**LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA (LMCK)  
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

**2022**



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**  
**TAHUN 2022**

Email : [ditprashubdat@gmail.com](mailto:ditprashubdat@gmail.com)

 : [ditprasaranatj](https://www.instagram.com/ditprasaranatj)

Jl. Medan Merdeka Barat No 8, Lt 10, Gedung Karya, Kemenhub

## 1. UNIT KERJA ESELON II



### Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II (Direktorat Prasarana Transportasi Jalan) Tahun 2022

#### DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

#### Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2022

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	<b>Nama Staff :</b> <b>Susiani,A.Md LLAJ, ST,</b> <b>MT</b>	<b>Analisis Data dan Informasi</b> <b>Jaringan Prasarana dan</b> <b>Pelayanan, Seksi Rancang</b> <b>Bangun Terminal</b>	12/22 /7	
2.	Diperiksa	<b>Nama Pejabat Eselon IV:</b> <b>1. Dody Arifianto, S.SiT</b>  <b>2. Jekky Hendri, S.Sos</b>	<b>1. Koordinator Kelompok</b> <b>Substansi Pengelolaan</b> <b>Terminal Angkutan Jalan</b>  <b>2. Koordinator Kelompok</b> <b>Substansi Rancang</b> <b>Bangun Terminal</b> <b>Angkutan Jalan</b>	12/22 /7	
3.	Disetujui	<b>Nama Pejabat Eselon III</b> <b>Ahmadi ZB, ATD, SE</b>	<b>Kepala Subdit Terminal</b> <b>Angkutan Jalan</b>	13/22 /7	

## 2. UNIT KERJA ESELON II



### Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II (Direktorat Prasarana Transportasi Jalan) Tahun 2022

## DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

### Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2022

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	<b>Nama Staff :</b> Rumsiah Nopitasari	Penyusun Bahan Kebijakan, Seksi Pengelolaan PKB	13/07/2022	M
2.	Diperiksa	<b>Nama Pejabat Eselon IV:</b> 1. Ayu Nilawati Agustina, SE., M. MTr  2. Teguh Ilman Santoso, A.Md LLAJ., ST., M.Sc	1. Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor  2. Koordinator Kelompok Substansi Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor	13/7/22	Y
3.	Disetujui	<b>Nama Pejabat Eselon III</b> Eriza Putra, S.SI, M.M	Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	13/7/22	R

## 2. UNIT KERJA ESELON II



### Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II (Direktorat Prasarana Transportasi Jalan) Tahun 2022

#### DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

#### Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2022

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	<b>Nama Staff : Dwiki Aditya</b>	<b>Penyusun Rencana dan Program, Seksi Integrasi Moda</b>	12/07/2022	
2.	Diperiksa	<b>Nama Pejabat Eselon IV: Astri Widiani</b>	<b>1. Koordinator Kelompok Substansi Fasilitas Pendukung  2. Koordinator Kelompok Substansi Integrasi Moda</b>	12/7/22	
3.	Disetujui	<b>Nama Pejabat Eselon III Herman Armanda, SE., MT</b>	<b>Kepala Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda</b>	13/7/22	

## 2. UNIT KERJA ESELON II



### Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II (Direktorat Prasarana Transportasi Jalan) Tahun 2022

#### DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

#### Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2022

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	<b>Nama Staff :</b> <b>Agus Jaya, S.ST</b>	<b>Penyusun Bahan Usaha, Seksi Penyelenggaraan Kemitraan</b>	12/7/2022	
2.	Diperiksa	<b>Nama Pejabat Eselon IV:</b> <b>1. Diana Septi Rahayu, SE, MT</b>  <b>2. Rizki Fauzi Rahman, S.SiT, M.Si</b>	<b>1. Koordinator Kelompok Penyelenggaraan Kemitraan, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana</b>  <b>2. Koordinator Kelompok Pengawasan dan Evaluasi, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana</b>	12/9/2022	
3.	Disetujui	<b>Nama Pejabat Eselon III</b> <b>Susanty Pertiwi, SS, M.HUM</b>	<b>Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana</b>	12/7/2022	

## 2. UNIT KERJA ESELON II



### Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2022

#### DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

#### Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2022

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	<b>Nama Staff :</b> <b>Riska Mahanani Pratiwi</b>	<b>Penyusun Data</b> <b>Kepegawaian</b>	12/7 <sup>22</sup>	
2.	Diperiksa	<b>Nama Pejabat Eselon IV:</b> <b>Sudarmaji, SAP.,MM</b>	<b>Koordinator Kelompok</b> <b>Substansi Tata Usaha</b>	14/7 <sup>22</sup>	
3.	Disetujui	<b>Nama Pejabat Eselon II</b> <b>Ir. M. Popik</b> <b>Montanasyah, M.T.T</b>	<b>Direktur Prasarana</b> <b>Transportasi Jalan</b>	15/7 <sup>22</sup>	

# KATA PENGANTAR

---

Sebagai institusi publik, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan II Tahun 2022 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2022 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Tahun 2022.

Diharapkan Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan II Tahun 2022 ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, 13 Juli 2022

**DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**



Ir. M. Popik Montanasyah, M.T.  
NIP. 19630910 199203 1 003

# Ringkasan

## Eksekutif

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024, untuk mendukung tercapainya target Rencana Strategis tersebut, maka dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2022, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja Tahun 2022, secara keseluruhan kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sudah baik. Dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK), Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2022, terdapat 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ( $SK \geq 100\%$ ) dan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan kurang dari 100% ( $0\% \leq IKP < 100\%$ ).

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II Tahun 2022 ini terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Sesuai dengan hasil capaian kinerja triwulan II Tahun 2022, untuk Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dari 9 IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdapat 4 (empat) IKK dengan status hijau dengan kondisi lebih besar atau sama dengan 100% ( $IKP \geq 100\%$ ) dan 5 (lima) status merah dengan kondisi kurang dari 100% ( $0\% \leq IKP < 100\%$ ). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### **Indikator Kinerja Kegiatan lebih besar atau sama dengan 100% ( $IKK \geq 100\%$ ):**

1. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi terealisasi sebesar 104 lokasi (target tahun 2022 sebesar 104 lokasi), dengan capaian kinerja sebesar 100%;
2. Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda terealisasi sebesar 11 lokasi (target tahun 2022 sebesar 11 lokasi), dengan capaian kinerja sebesar 100%;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A terealisasi sebesar 98 (target tahun 2022 sebesar 80,5) dengan Capaian Kinerja sebesar 121,74%;
4. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terealisasi sebesar 23,08% (target tahun 2022 sebesar 30%), dengan capaian kinerja sebesar 123,07%.

### **Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ( $0\% \leq IKP < 100\%$ ):**

1. Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan terealisasi 0,61 (target tahun 2022 sebesar 0,65), dengan capaian kinerja sebesar 93,85%;
2. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A terealisasi sebesar 53,6% (target tahun 2022 sebesar 53,65 %), dengan capaian kinerja sebesar 99,91%;
3. Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A terealisasi 72,63 % (target tahun 2022 sebesar 74,15%), dengan capaian kinerja sebesar 97,95%;
4. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat terealisasi sebesar 85 (target tahun 2022 sebesar 87), dengan capaian kinerja sebesar 97,70%;

5. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terealisasi 71 (target tahun 2022 sebesar 72), dengan capaian kinerja sebesar 98,61%;

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran Kinerja adalah sebesar 104,77% dan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian indikator kinerja kegiatan adalah sebesar 103,65%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan, kegiatan, sasaran, indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020 – 2024.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui pelaksanaan monitoring yang dilakukan secara berkala.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang .....	I-1
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	I-2
I.2.1 Bagan Struktur Organisasi .....	I-3
I.3 Sumber Daya Manusia.....	I-4
I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan .....	I-4
I.5 Sistematika Laporan.....	I-5
I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis .....	I-9
I.7 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 .....	I-11
I.8 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	I-11
<b>BAB II AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
<b>II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja</b> .....	<b>II-1</b>
<b>II.2 Pengukuran Capaian Kinerja</b> .....	<b>II-3</b>
<b>II.2.1 SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi</b> .....	<b>II-5</b>
<b>II.2.1.1 IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan</b> .....	<b>II-5</b>
a.1 Definisi Indikator Kinerja .....	II-5
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	II-7
a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan.. ..	II-8
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang.....	II-8
<b>II.2.1.2 IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi</b> .....	<b>II-9</b>
a.1 Definisi Indikator Kinerja .....	II-13
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	II-14
a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan.. ..	II-14
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang.....	II-20
<b>II.2.1.3 IKK 3 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda</b> .....	<b>II-20</b>
a.1 Definisi Indikator Kinerja .....	II-20
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	II-22
a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan.. ..	II-22
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang.....	II-25



<b>II.2.2 SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat.</b>	<b>II-25</b>
<b>II.2.2.1 IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A.....</b>	<b>II-25</b>
a.1 Definisi Indikator Kinerja .....	II-25
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	II-28
a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan.. ..	II-29
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang.....	II-31
<b>II.2.2.2 IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A .....</b>	<b>II-31</b>
a.1 Definisi Indikator Kinerja .....	II-31
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	II-37
a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan.. ..	II-38
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang.....	II-44
<b>II.2.2.3 IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A .....</b>	<b>II-45</b>
a.1 Definisi Indikator Kinerja .....	II-45
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	II-45
a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan.. ..	II-46
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang.....	II-47
<b>II.2.3 SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat .....</b>	<b>II-48</b>
<b>II.2.3.1 IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.....</b>	<b>II-48</b>
a.1 Definisi Indikator Kinerja .....	II-48
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	II-48
a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan.. ..	II-49
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang.....	II-54
<b>II.2.4 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat .....</b>	<b>II-54</b>
<b>II.2.4.1 IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.....</b>	<b>II-54</b>
a.1 Definisi Indikator Kinerja .....	II-54
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	II-57
a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan.. ..	II-57
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang.....	II-61



<b>II.2.5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum .....</b>	<b>II-62</b>
<b>II.2.5.1 IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran</b>	
<b>Direktorat Prasarana Transportasi Jalan .....</b>	<b>II-62</b>
a.1 Definisi Indikator Kinerja .....	II-62
a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	II-65
a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan.. .....	II-65
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang.....	II-67
<b>II.3 Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2022 .....</b>	<b>II-67</b>
II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2022 .....	II-67
II.3.1.1 Pagu Anggaran .....	II-67
a.1 Rincian Per Sumber Dana Tahun 2022 .....	II-67
a.2 Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2022.....	II-67
a.3 Uraian surat Pengesahan Revisi Anggaran.....	II-68
II.3.1.2 Refocusing Anggaran Tahun 2022.....	II-68
a.1 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2022 .....	II-69
a.2 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2022 .....	II-69
a.3 Rincian Revisi Anggaran Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2022 .....	II-70
a.4 Rincian Revisi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Tahun 2022... ..	II-70
II.3.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 – 2022 .....	II-71
II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022 .....	II-72
III.3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Tahun 2022.....	II-72
III.3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022 .....	II-73
III.3.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2022 .....	II-74
III.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	II-75
III.3.3.1 Hambatan dan Kendala .....	II-75
III.3.3.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia.....	II-76
III.3.3.3 Hambatan dan Kendala .....	II-77
<b>BAB III PENUTUP</b>	
III.1 Penutup.....	III-1
III.1.1 Ringkasan Capaian .....	III-1
III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab .....	III-3

# DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar I.1	Bagan Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.....	I-3
Gambar II.1	Grafik Capaian IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan .....	II-8
Gambar II.2	Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi .....	II-14
Gambar II.3	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Realisasi IKK Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda..	II-22
Gambar II.4	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A.....	II-28
Gambar II.5	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	II-38
Gambar II.6	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A .....	II-45
Gambar II.7	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	II-49
Gambar II.8	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat .....	II-57

Gambar II.9	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	II-65
Gambar II.10	Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2019 – Tahun 2022.....	II-71
Gambar II.11	Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 .....	II-74



# B A B I

# PENDAHULUAN

## I. 1. Latar Belakang

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan Prudent, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga untuk mendukung agar tercapai prinsip Good Governance itu, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan memerlukan adanya Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.





## I. 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi jalan.

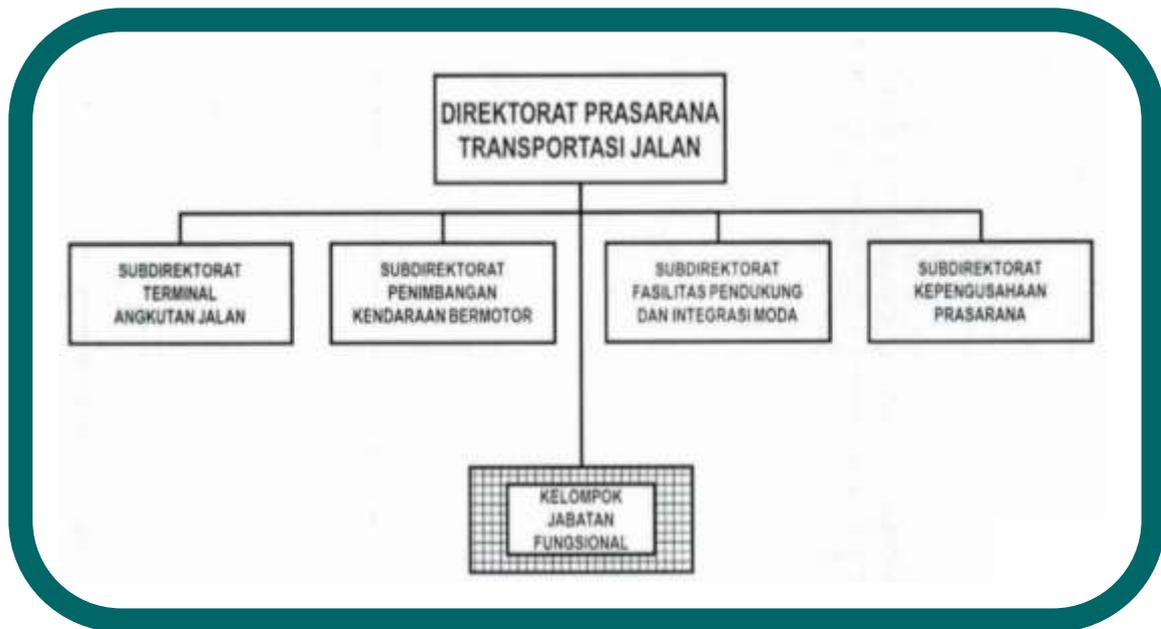
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
3. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana; dan;
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan;
2. Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor;
3. Sub Direktorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;
4. Sub Direktorat Kepengusahaan Prasarana; dan

# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Bagan Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan



### I. 3. Sumber Daya Manusia

Pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan posisi Triwulan II Tahun 2022 diklasifikasikan menurut sub unit kerja, golongan, pendidikan umum dan jenis kelamin sebanyak 87 orang pegawai, Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.1. Pegawai Berdasarkan Sub Unit Kerja

NO.	SUB UNIT KERJA	PNS	CPNS	PPNP	JUMLAH
1.	Kelompok Tata Usaha	8	-	8	16
2.	Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan	13	3	5	21
3.	Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	12	2	5	19
4.	Sub Direktorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	11	1	5	17
5.	Sub Direktorat Kepengusahaan Prasarana	10	-	3	13
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>86</b>

### I. 4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

#### I.4.1. Kewenangan

a. *UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*

- 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- 3) *Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009*  
Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

b. *UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.



#### I.4.2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai target, sasaran dan tujuan organisasi, perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya, meliputi ketersediaan SDM yang ideal sesuai dengan beban kerja yang ada pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

#### I.4.3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Direktorat Prasarana Transportasi Jalan hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

Dalam rangka mendukung alokasi anggaran program vaksinasi secara nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional maka *automatic adjustment* belanja Kementerian/Lembaga perlu dilakukan. Perubahan / revisi anggaran dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 yang dilakukan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan total anggaran semula sebesar Rp 87.452.162.000,- menjadi Rp. 85.443.764.000,-. Terdapat *automatical adjustment* I dan II dengan total sebesar Rp. 8.982.232.000,- pada triwulan II tahun 2022 yang masih dalam posisi *freeze*, sehingga dapat mempengaruhi prognosa akhir realisasi anggaran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

#### I.4.4. Isu Strategis

Isu Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah:

1. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
2. Pengoperasian Terminal Penumpang;
3. ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
4. Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal dan UPPKB.

#### I.4.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2022 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Kegiatan
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

### I. 5. Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan II ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
  - **Bagan Struktur Organisasi**
- I.3 Sumber Daya Manusia



I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.5 Sistematika Laporan

I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

- **Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022**

I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

## **BAB II AKUNTABILITAS KINERJA**

### **II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja**

### **II.2 Pengukuran Capaian Kinerja**

#### **II.2.1. SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi**

- **Uraian Sasaran Program**

##### **II.2.1.1 IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan**

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
  - Narasi Dasar Hukum
  - Narasi Kronologi Target
  - Narasi Faktor Keberhasilan
  - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
  - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
  - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
  - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

##### **II.2.1.2 IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi**

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
  - Narasi Dasar Hukum
  - Narasi Kronologi Target
  - Narasi Faktor Keberhasilan
  - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
  - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
  - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
  - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

##### **II.2.1.3 IKK 3 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda**

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
  - Narasi Dasar Hukum
  - Narasi Kronologi Target
  - Narasi Faktor Keberhasilan
  - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
  - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
  - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja



- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

## **II.2.2. SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat**

### **• Uraian Sasaran Kinerja**

#### **II.2.2.1 IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A**

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
  - Narasi Kronologi Target
  - Narasi Faktor Keberhasilan
  - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
  - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
  - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
  - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

#### **II.2.2.2 IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A**

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
  - Narasi Kronologi Target
  - Narasi Faktor Keberhasilan
  - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
  - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
  - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
  - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

#### **II.2.2.3 IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A**

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
  - Narasi Kronologi Target
  - Narasi Faktor Keberhasilan
  - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
  - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
  - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
  - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang





### **II.2.3. SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat**

#### **• Uraian Sasaran Kegiatan**

##### **II.2.3.1 IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat**

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
  - Narasi Dasar Hukum
  - Narasi Kronologi Target
  - Narasi Faktor Keberhasilan
  - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
  - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
  - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
  - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

### **II.2.4. SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat**

#### **• Uraian Sasaran Kegiatan**

##### **II.2.4.1 IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat**

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
  - Narasi Dasar Hukum
  - Narasi Kronologi Target
  - Narasi Faktor Keberhasilan
  - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
  - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
  - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
  - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

### **II.2.5 SK1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum**

#### **• Uraian Sasaran Kegiatan**

##### **II.2.5.1 IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan**

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
  - Narasi Dasar Hukum
  - Narasi Kronologi Target
  - Narasi Faktor Keberhasilan
  - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
  - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
  - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
  - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang





## II.3 Realisasi Anggaran

### II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2022

#### II.3.1.1 Pagu Anggaran

- a.1 Rincian Per Sumber Dana Tahun 2022
- a.2 Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2022
- a.3 Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

#### II.3.1.2 Revisi Anggaran Tahun 2022

- a.1 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2022
- a.2 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2022
- a.3 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2022
- a.4 Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

#### II.3.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2019 - 2022

### II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2022

#### II.3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

#### II.3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022

#### II.3.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2022

#### II.3.2.4 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

### II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

#### II.3.3.1 Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya Keuangan

#### II.3.3.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia (table perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)

#### II.3.3.3 Hambatan dan Kendala

## BAB III PENUTUP

### III.1 Penutup

#### III.1.1 Ringkasan Capaian

### III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

## Lampiran

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
3. Rencana Aksi Tahun 2022;
4. Monitoring Renaksi 2022;

## I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan target indikator Kinerja Kegiatan dari Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Sasaran Program Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar dapat bersinergi dalam mendukung tercapainya Sasaran Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.





Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel I.2** Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024 Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2019	Target s.d 2024	
1	SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	-	0,70
		IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	99	114
		IKK 3	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	-	25
2	SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	Indeks (%)	-	81,5
		IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Rasio (%)	53,54	53,75
		IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	Rasio (%)	70,17	83,38
3	SK.3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Rasio (%)	65,0	20,0
4	SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	-	89
5	SK.1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	-	74



### I.7 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

Dalam mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2022. Berikut adalah tabel Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan :

**Tabel I.3** Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2022
1	SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,67
		IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	111
		IKK 3 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	15
2	SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	Indeks (%)	80,50
		IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Rasio (%)	53,65
		IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	Rasio (%)	74,15
3	SK.3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Rasio (%)	30
4	SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	87
5	SK.1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	72

### I.8 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2022 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.



Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen dengan Total Anggaran per 1 Januari 2022 sebesar Rp. 87.452.162.000,- adalah sebagai berikut:

**Tabel I.4** Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2022	
1	SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,65
		IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	104
		IKK 3	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	11
2	SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	Indeks (%)	80,50
		IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Rasio (%)	53,65
		IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	Rasio (%)	74,15
3	SK.3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	Rasio (%)	30
4	SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	87
5	SK.1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	72

**Kegiatan**

1. Pelayanan Transportasi Darat
2. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat
3. Penunjang Teknis Transportasi Darat
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat

**Anggaran**

- Rp. 21.300.000.000
- Rp. 9.400.000.000
- Rp. 29.533.358.000
- Rp. 27.218.804.000





# B A B II

# AKUNTABILITAS

# KINERJA

## II. 1. Tahapan Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya. Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas inputing, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id>, sehingga dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.





Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing. Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

### Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

#### Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

### Pengukuran Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2022

1. Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dan analisis



- penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022.
2. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 terhadap target kinerja Tahun 2022;
  3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 Dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024.
  4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Tahun 2022.

## **II.2 Pengukuran Capaian Kinerja**

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.



Berikut adalah Indikator Kinerja Kegiatan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020 – 2024 :

**Tabel II.1** Pengukuran Capaian Kinerja

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
<b>SK1</b>	<b>Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi</b>				<b>88,86%</b>			<b>97,95%</b>	
IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,65	0,65	0,61	93,85%	0,65	0,61	93,85%
IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	104	104	104	100%	104	104	100%
IKK 3	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	Lokasi	11	11	8	72,73%	11	11	100%
<b>SK2</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat</b>				<b>99,31%</b>			<b>106,53%</b>	
IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	80,5	80,5	80,55	100,06%			121,74%
IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,65	53,65	53,6	99,91%	53,65	53,6	99,91%
IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	74,15	74,15	72,63	97,95%	74,15	72,63	97,95%
<b>SK3</b>	<b>Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat</b>				<b>126,63%</b>			<b>123,07%</b>	
IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	%	30	30	22,01	126,63%	30	23,08	123,07%
<b>SK5</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat</b>				<b>94,48%</b>			<b>97,7%</b>	
IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	87	87	82,2	94,48%	87	85	97,7%
<b>SK1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>				<b>98,61%</b>			<b>98,61%</b>	
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	72	72	71	98,61%	72	71	98,61%
<b>Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan</b>					<b>101,58%</b>			<b>104,77%</b>	
<b>Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan</b>					<b>98,25%</b>			<b>103,65%</b>	
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%)					<b>3</b>			<b>4</b>	
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)					<b>6</b>			<b>5</b>	

Jika dilihat lebih detail, sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dari 9 IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdapat 4 (empat) IKK dengan status hijau dengan kondisi lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%) dan 5 (lima) status merah dengan kondisi kurang dari 100% (0%≤IKP<100%).



Selama tahun 2022, ada 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 9 IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

### **II.2.1 SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi**

- Uraian Sasaran Kegiatan

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengawal dan memastikan kegiatan prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1. Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan.
2. IKK 2. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi
3. IKK 3. Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda

#### **II.2.1.1 IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan**

##### **a.1 Definisi Indikator Kinerja**

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, terdapat sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan untuk dilayani Angkutan Umum dan Fasilitas Prasarana Jalan serta Angkutan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Penyeberangan. Dari total Kawasan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melayani 83 Kawasan Strategis Nasional.

IKK Rasio Kawasan Strategis Nasional (KSN)\* yang telah terlayani simpul prasarana transportasi jalan merupakan perbandingan jumlah KSN prioritas yang telah terlayani prasarana transportasi jalan terhadap jumlah KSN prioritas.

IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan merupakan perbandingan Jumlah KSN Prioritas yang telah terlayani prasarana transportasi jalan pada Kawasan Prioritas Nasional terhadap jumlah Kawasan Strategis Nasional yang telah ditetapkan.



Untuk menghitung IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional s.d tahun}(n)(10 \text{ DPP}, 9 \text{ KI}, 8 \text{ KEK}, 42 \text{ PKN})}{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional (10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN) yang ditetapkan}} \times \text{yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan}$$

Kawasan Strategis Nasional (KSN) prioritas yang direncanakan untuk diakomodir akan dilayani prasarana transportasi jalan dan meliputi **10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN dengan total 69 wilayah KSN**. Adapun daftar Kawasan prioritas dimaksud adalah sebagai berikut terdiri dari:

#### **10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)**

1. KSPN Danau Toba;
2. KSPN Bangka Belitung;
3. KSPN Borobudur;
4. KSPN Bromo Tengger Semeru;
5. KSPN Mandalika;
6. KSPN Labuan Bajo;
7. KSPN Likupang;
8. KSPN Wakatobi;
9. KSPN Morotai;
10. KSPN Raja Ampat.

#### **9 Kawasan Industri (KI)**

1. KI Sei Mangkei;
2. KI Galang Batang;
3. KI Bintan Aerospace;
4. KI Sadai;
5. KI Ketapang
6. KI Surya Borneo;
7. KI Palu;
8. KI Teluk Weda;
9. KI Teluk Bintuni

#### **8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)**

1. KPBPB Sabang;
2. KEK Arun Lhokseumawe;
3. KPBPB Batam Bintan Karimun;
4. KEK Tanjung Lesung;
5. KEK Mandalika\*;
6. KEK MBTK;
7. KEK Bitung;
8. KEK Morotai;

#### **42 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berdasarkan PP 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional:**

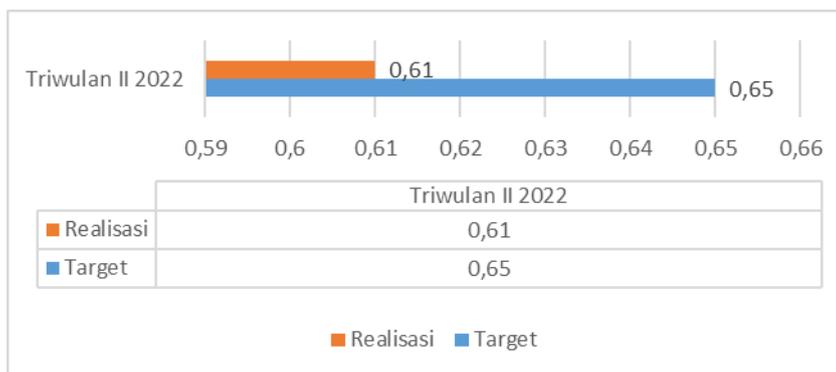
1. Banda Aceh;
2. Mebidangro;
3. Padang-Lubuk Agung-Pariaman;
4. Pekanbaru;
5. Dumai;
6. Batam;



7. Jambi;
8. Palembang dsk;
9. Bengkulu;
10. Pangkal Pinang;
11. Bandar Lampung;
12. Jabodetabek;
13. Serang;
14. Cilegon;
15. Bandung Raya;
16. Cirebon;
17. Surakarta;
18. Kedungsepur;
19. Cilacap;
20. Yogyakarta;
21. Gerbangkertosusilo;
22. Malang;
23. Sarbagita;
24. Mataram Raya;
25. Kupang;
26. Pontianak;
27. Palangkaraya;
28. Banjarmasin dsk;
29. Balikpapan-Samarinda-Bontang;
30. Tarakan;
31. Gorontalo;
32. Manado;
33. Bitung;
34. Palu;
35. Maminasata;
36. Kendari;
37. Ambon;
38. Ternate;
39. Sorong;
40. Timika;
41. Jayapura;
42. Merauke.

#### **a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Realisasi kinerja Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sebesar 0,61 jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebesar 0,65 maka capaian kinerja mencapai 93,85%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan.



Gambar II.1 Grafik Capaian IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan  
Sumber: Data Olahan

### a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, terdapat sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan untuk dilayani Angkutan Umum dan Fasilitas Prasarana Jalan serta Angkutan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Penyeberangan. Dari total Kawasan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melayani 83 Kawasan Strategis Nasional.

#### **Terminal Penumpang Tipe A**

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia, jumlah Terminal Penumpang Tipe A adalah **126 (seratus dua puluh enam)** terminal dengan rincian eksisting sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Sampai akhir Tahun 2021, telah dilakukan serah terima operasional Terminal Penumpang Tipe A yang merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 111 (seratus sebelas) terminal, yang terdiri dari 103 (seratus tiga) terminal yang telah beroperasi, dan 8 terminal belum beroperasi yakni:
  - 1) 4 (empat) Terminal Penumpang Tipe A masih dalam proses pembangunan (Terminal Demak, Terminal Bimoku, Terminal Bolangmongondow, Terminal Singkawang).
  - 2) 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A masih proses kajian alih fungsi terminal (Terminal Betan Subing).
  - 3) 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A rusak berat akibat gempa tahun 2000 (Terminal Air Sebakul).
  - 4) 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A tidak ada jalan akses (Terminal Liwas).
  - 5) 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A masih terkendala karena sertifikat aset yang belum diserahkan (Terminal Kefamenanu).
- b. Sedangkan 15 (lima belas) terminal lainnya bukan merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan tidak dilakukan serah terima, yakni:



- 1) 4 (empat) terminal merupakan kewenangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan telah beroperasi;
- 2) 2 (dua) terminal merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan telah beroperasi;
- 3) 8 (delapan) terminal yang telah beroperasi merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang belum diserahkan ke Pemerintah Pusat;
- 4) 1 (satu) terminal yang telah beroperasi yang dikelola oleh swasta.

Dari 126 Terminal Penumpang Tipe A yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia terdapat **53** Terminal Penumpang Tipe A telah melayani Kawasan Strategis Nasional sebanyak **41 Kawasan** dari 69 Kawasan Strategis Nasional yg terdiri dari **10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN**. Sisanya 73 terminal tidak masuk dalam perhitungan rasio konektivitas transportasi darat karena tidak termasuk dalam kawasan strategis nasional.

### **Terminal Barang Untuk Umum**

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:

1. KP 75 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum dan Terminal Transit Penumpang di Entikong Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
2. KM 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Nanga Badau yang Berlokasi di Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
3. KM 45 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Aruk yang Berlokasi di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dan;
4. KM 139 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum yang Berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua.

Berikut adalah jumlah Terminal Barang untuk umum sebanyak 7 Terminal, antara lain:

1. Entikong di Kalimantan Barat;
2. Aruk di Kalimantan Barat;
3. Nanga Badau di Kalimantan Barat;
4. Motaain di Nusa Tenggara Timur;
5. Motamasin di Nusa Tenggara Timur;
6. Wini di Nusa Tenggara Timur;
7. Skouw di Papua. (PKN Jayapura)



Rincian dari 7 (tujuh) Terminal Barang Untuk Umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) Terminal Barang Entikong Untuk Umum yang sudah selesai dibangun pada tahun 2020, dengan kondisi tahun 2021 sudah ada operasional internal oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) akan tetapi belum ada pelayanan terhadap kendaraan barang baik kendaraan barang domestik maupun kendaraan barang internasional. Adapun kendala/masalah yang masih dihadapi Terminal Barang Entikong adalah sebagai berikut:
  - a) Karena Pandemi Covid-19 Masih Berlangsung, Pihak Malaysia masih melakukan lockdown sehingga perbatasan di Entikong masih di Tutup. Perbatasan Entikong mulai di tutup sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang, dan hanya memperbolehkan melintas adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan atau pulang secara mandiri.
  - b) Tanda Daftar Gudang Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong belum bisa di dapatkan, karena Pihak ke tiga sebagai pengelola Gudang/Tempat Penimbunan Sementara (TPS) belum ada yang serius sebagai pengelola gudang/Tempat Penimbunan Sementara (TPS) tersebut. Sehingga belum bisa diarahkan untuk mengurus Tanda Daftar Gudang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kab. Sanggau.
  - c) Gedung Showcase sudah di survei oleh Calon Penyewa. Karena aktivitas operasional Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong belum dilaksanakan sehingga belum ada tindak lanjut dari Calon Penyewa showcase tersebut.
  - d) Standar Operasional Prosedur komoditi Eksport dan Import antar 2 negara belum di tetapkan, karena forum Sosek Malindo yang akan membahas hal tersebut belum dilaksanakan karena masih berlangsung pandemi covid-19 dan pihak Malaysia masih melakukan lockdown sehingga perbatasan mereka di tutup.
  - e) Proses Sertifikat tanah masih terdapat kendala dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong sehingga proses Penetapan Status Penggunaan (PSP) tanah menjadi terhambat. Pihak yang berbatasan tanah tersebut tidak mau menanda tangani surat ukur tanah yang menjadi syarat untuk penerbitan sertifikat tanah Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong.
  - f) Jalan akses khusus dari Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong menuju Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong belum ada, tetapi sudah ditindak lanjuti oleh Direktorat Pembangunan Jalan Kementerian PUPR.
  - g) Model Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pengelola Tempat Penimbunan Sementara (TPS), sewa atau bagi hasil belum ada dan perlu minta arahan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak. Hal ini terkendala dikarenakan penetapan pengelola Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di TBI Entikong belum ada.
2. Terdapat **6 (enam) Terminal Barang** Untuk Umum yang masih dalam proses pembangunan, yaitu Aruk di Kalimantan Barat, Nanga Badau di Kalimantan Barat, Motaain di Nusa Tenggara Timur, Motamasin di Nusa Tenggara Timur, Wini di Nusa Tenggara Timur dan Skouw di Papua. (PKN Jayapura).



### **Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda**

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
  2. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional dan;
  3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024.
- Narasi Kronologi Target  
Berdasarkan target pada renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024, untuk target pada tahun 2022 adalah sebesar 0,67 dengan jumlah 47 KSN terlayani oleh simpul Prasarana Transportasi Jalan disesuaikan dengan kegiatan pada DIPA TA 2022 menjadi 0,65 dengan 45 KSN terlayani simpul Prasarana Transportasi Jalan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
  - Narasi Faktor Keberhasilan  
Keberhasilan terhadap kinerja Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 yaitu:
    1. Dari 126 Terminal Penumpang Tipe A yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia terdapat **53 Terminal Penumpang Tipe A** telah melayani Kawasan Strategis Nasional sebanyak **41 Kawasan** dari **69 Kawasan Strategis Nasional** yg terdiri dari **10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN**. Sisanya **73 terminal** tidak masuk dalam perhitungan rasio konektivitas transportasi darat karena tidak termasuk dalam kawasan strategis nasional.  
  
Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda di **Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Nasional** dengan target penyediaan fasilitas pendukung sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sebanyak **11 lokasi** dan **teralisasi** sebanyak **11 (Sebelas) lokasi**, yaitu Mandalika, Magelang, Purworejo, Surakarta, Klaten, Salatiga, Palembang, Pekanbaru, Danau Toba, Borobudur, dan Denpasar.  
  
Dari **11 (sebelas)** lokasi penyediaan fasilitas pendukung, terdapat **11 (sebelas)** lokasi sudah terealisasi yang berada di **7 Kawasan Strategis Nasional**.
    2. Melakukan kegiatan Evaluasi Paruh Waktu Renstra untuk menyesuaikan kembali antara target dan realisasi yang telah dilaksanakan.



3. Mengoptimalkan kegiatan Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan;

- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
  1. Jumlah SDM yang mengoperasikan terminal antara terminal yang satu dengan terminal yang lainnya tidak sesuai porsi kebutuhannya, sehingga terdapat beberapa terminal yang memiliki jumlah personil yg cukup akan tetapi masih banyak terminal yang masih kekurangan petugas.
  2. Koordinasi perijinan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) terkait titik lokasi pembangunan fasilitas pendukung yang berada diatas bahu jalan;
  3. Perubahan rute angkutan umum di wilayah KSPN menyebabkan perubahan titik lokasi fasilitas pendukung;
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja  
IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan merupakan perbandingan Jumlah KSN Prioritas yang telah terlayani prasarana transportasi jalan pada Kawasan Prioritas Nasional terhadap jumlah Kawasan Strategis Nasional yang telah ditetapkan.  
Untuk menghitung IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan digunakan rumus sebagai berikut:

Sehingga:

$$\frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional s.d tahun}(n)(10 \text{ DPP}, 9 \text{ KI}, 8 \text{ KEK}, 42 \text{ PKN})}{\text{yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan}} = \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional (10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN) yang ditetapkan}}{}$$

$$\text{Capaian Rasio Konektivitas} = \frac{42 \text{ wilayah (irisian simpul TTA \& faspim yang terlayani)}}{69 \text{ wilayah KSN}} = 0,61$$

- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja  
Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan pada Triwulan II Tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,61}{0,65} \times 100\% = 93,85\%$$

- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan  
Berdasarkan DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2022, Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan adalah sebagai berikut Kegiatan Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 403.500.000,- dengan realisasi hingga Triwulan II sebesar Rp. 163.100.982,- atau mencapai 40,42%.



a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan percepatan kegiatan pembangunan pada simpul-simpul prasarana transportasi Jalan;
2. Melakukan pembangunan dengan mempertimbangkan skala prioritas sesuai dengan target pada sasaran strategis yang telah ditetapkan;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

### II.2.1.2. IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

#### a.1 Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia, jumlah Terminal Penumpang Tipe A adalah **126 (seratus dua puluh enam)** terminal dengan rincian eksisting sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Sampai akhir Tahun 2021, telah dilakukan serah terima operasional Terminal Penumpang Tipe A yang merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 111 (seratus sebelas) terminal, yang terdiri dari 103 (seratus tiga) terminal yang telah beroperasi, dan 8 terminal belum beroperasi yakni:
  - 1) 4 (empat) Terminal Penumpang Tipe A masih dalam proses pembangunan (Terminal Demak, Terminal Bimoku, Terminal Bolangmongondow, Terminal Singkawang).
  - 2) 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A masih proses kajian alih fungsi terminal (Terminal Betan Subing).
  - 3) 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A rusak berat akibat gempa tahun 2000 (Terminal Air Sebakul).
  - 4) 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A tidak ada jalan akses (Terminal Liwas).
  - 5) 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A masih terkendala karena sertifikat aset yang belum diserahkan (Terminal Kefamenanu).
- b. Sedangkan 15 (lima belas) terminal lainnya bukan merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan tidak dilakukan serah terima, yakni:
  - 1) 4 (empat) terminal merupakan kewenangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan telah beroperasi;
  - 2) 2 (dua) terminal merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan telah beroperasi;
  - 3) 8 (delapan) terminal yang telah beroperasi merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang belum diserahkan ke Pemerintah Pusat;
  - 4) 1 (satu) terminal yang telah beroperasi yang dikelola oleh swasta.



Dari 126 Terminal Penumpang Tipe A yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia terdapat **53** Terminal Penumpang Tipe A telah melayani Kawasan Strategis Nasional sebanyak **41 Kawasan** dari 69 Kawasan Strategis Nasional yg terdiri dari **10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN**. Sisanya 73 terminal tidak masuk dalam perhitungan rasio konektivitas transportasi darat karena tidak termasuk dalam kawasan strategis nasional.

Untuk menghitung IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah TTA \& TB yang beroperasi} \\ & = \text{Jumlah TTA yang Beroperasi} + \text{Jumlah TB yang beroperasi} \end{aligned}$$

Keterangan :

- \* TTA = Terminal Tipe A
- TB = Terminal Barang

### a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Realisasi Kinerja IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada Triwulan II tahun 2022 sebesar 104 lokasi, jika dibandingkan dengan target PK tahun 2022 sebesar 104 maka capaian kinerja mencapai 100%.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa antara target dengan realisasi masih sama, karena belum ada penambahan lokasi pengoperasian Terminal Tipe A dan Terminal Barang. Kegiatan tersebut diakomodir oleh kegiatan monitoring operasional Terminal Penumpang Tipe A. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi.



Gambar II.2 Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

### a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum

#### **Terminal Penumpang Tipe A**

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia, jumlah Terminal Penumpang Tipe A adalah **126 (seratus dua puluh enam)** terminal dengan rincian eksisting sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Sampai akhir Tahun 2021, telah dilakukan serah terima operasional Terminal Penumpang Tipe A yang merupakan kewenangan Direktorat



Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 111 (seratus sebelas) terminal, yang terdiri dari 103 (seratus tiga) terminal yang telah beroperasi, dan 8 terminal belum beroperasi yakni:

- 6) 4 (empat) Terminal Penumpang Tipe A masih dalam proses pembangunan (Terminal Demak, Terminal Bimoku, Terminal Bolangmongondow, Terminal Singkawang).
  - 7) 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A masih proses kajian alih fungsi terminal (Terminal Betan Subing).
  - 8) 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A rusak berat akibat gempa tahun 2000 (Terminal Air Sebakul).
  - 9) 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A tidak ada jalan akses (Terminal Liwas).
  - 10) 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A masih terkendala karena sertifikat aset yang belum diserahkan (Terminal Kefamenanu).
- b. Sedangkan 15 (lima belas) terminal lainnya bukan merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan tidak dilakukan serah terima, yakni:
- 1) 4 (empat) terminal merupakan kewenangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan telah beroperasi;
  - 2) 2 (dua) terminal merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan telah beroperasi;
  - 3) 8 (delapan) terminal yang telah beroperasi merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang belum diserahkan ke Pemerintah Pusat;
  - 4) 1 (satu) terminal yang telah beroperasi yang dikelola oleh swasta.

Dari 126 Terminal Penumpang Tipe A yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia terdapat **53** Terminal Penumpang Tipe A telah melayani Kawasan Strategis Nasional sebanyak **41 Kawasan** dari 69 Kawasan Strategis Nasional yg terdiri dari **10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN**. Sisanya 73 terminal tidak masuk dalam perhitungan rasio konektivitas transportasi darat karena tidak termasuk dalam kawasan strategis nasional.

### **Terminal Barang Untuk Umum**

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:

1. KP 75 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum dan Terminal Transit Penumpang di Entikong Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
2. KM 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Nanga Badau yang Berlokasi di Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
3. KM 45 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Aruk yang Berlokasi di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dan;
4. KM 139 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum yang Berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua.



Berikut adalah jumlah Terminal Barang untuk umum sebanyak 7 Terminal, antara lain:

1. Entikong di Kalimantan Barat;
2. Aruk di Kalimantan Barat;
3. Nanga Badau di Kalimantan Barat;
4. Motaain di Nusa Tenggara Timur;
5. Motamasin di Nusa Tenggara Timur;
6. Wini di Nusa Tenggara Timur;
7. Skouw di Papua. (PKN Jayapura)

Rincian dari 7 (tujuh) Terminal Barang Untuk Umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) Terminal Barang Entikong Untuk Umum yang sudah selesai dibangun pada tahun 2020, dengan kondisi tahun 2021 sudah ada operasional internal oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) akan tetapi belum ada pelayanan terhadap kendaraan barang baik kendaraan barang domestik maupun kendaraan barang internasional. Adapun kendala/masalah yang masih dihadapi Terminal Barang Entikong adalah sebagai berikut:
  - a. Karena Pandemi Covid-19 Masih Berlangsung, Pihak Malaysia masih melakukan lockdown sehingga perbatasan di Entikong masih di Tutup. Perbatasan Entikong mulai di tutup sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang, dan hanya memperbolehkan melintas adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan atau pulang secara mandiri.
  - b. Tanda Daftar Gudang Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong belum bisa di dapatkan, karena Pihak ke tiga sebagai pengelola Gudang/Tempat Penimbunan Sementara (TPS) belum ada yang serius sebagai pengelola gudang/Tempat Penimbunan Sementara (TPS) tersebut. Sehingga belum bisa diarahkan untuk mengurus Tanda Daftar Gudang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kab. Sanggau.
  - c. Gedung Showcase sudah di survei oleh Calon Penyewa. Karena aktivitas operasional Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong belum dilaksanakan sehingga belum ada tindak lanjut dari Calon Penyewa showcase tersebut.
  - d. Standar Operasional Prosedur komoditi Eksport dan Import antar 2 negara belum di tetapkan, karena forum Sosek Malindo yang akan membahas hal tersebut belum dilaksanakan karena masih berlangsung pandemi covid-19 dan pihak Malaysia masih melakukan lockdown sehingga perbatasan mereka di tutup.
  - e. Proses Sertifikat tanah masih terdapat kendala dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong sehingga proses Penetapan Status Penggunaan (PSP) tanah menjadi terhambat. Pihak yang berbatasan tanah tersebut tidak mau menanda tangani surat ukur tanah yang menjadi syarat untuk penerbitan sertifikat tanah Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong.
  - f. Jalan akses khusus dari Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong menuju Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong belum ada, tetapi sudah ditindak lanjuti oleh Direktorat Pembangunan Jalan Kementerian PUPR.
  - g. Model Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pengelola Tempat Penimbunan Sementara (TPS), sewa atau bagi hasil belum ada dan perlu minta arahan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak. Hal ini terkendala dikarenakan penetapan pengelola Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di TBI Entikong belum ada.
2. Terdapat **6 (enam) Terminal Barang** Untuk Umum yang masih dalam proses pembangunan yaitu Aruk di Kalimantan Barat, Nanga Badau di Kalimantan Barat, Motaain di Nusa Tenggara Timur, Motamasin di Nusa Tenggara Timur, Wini di Nusa Tenggara Timur, Skouw di Papua. (PKN Jayapura)



- Narasi Kronologi Target  
Berdasarkan target pada renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024, untuk target Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada renstra yang semula sebanyak 111 terminal, berubah menjadi 104 terminal karena pada tahun 2022 tidak ada penambahan jumlah terminal tipe A baru yang beroperasi.
- Narasi Faktor Keberhasilan  
Keberhasilan terhadap operasional Terminal Tipe A yaitu:
  1. Adanya konsistensi berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia, jumlah Terminal Penumpang Tipe A adalah 126 (seratus dua puluh enam) jumlah Terminal Penumpang Tipe A tersebut telah beroperasi **103 Terminal**. Sedangkan untuk Terminal Barang untuk umum dari 7 (tujuh) terminal, jumlah terminal Barang Umum yang sudah beroperasi adalah **1 (satu) terminal** yaitu Terminal Entikong di Kalimantan Barat. Sehingga untuk Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi ada sebanyak **104 terminal**.
  2. Meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal.
  3. Melakukan kegiatan Evaluasi Paruh Waktu Renstra untuk menyesuaikan kembali antara target dan realisasi yang telah dilaksanakan.
  4. Mengoptimalkan kegiatan Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A;
  5. Mengoperasikan Terminal Barang Untuk Umum yang telah selesai dibangun meskipun kendaraan barang belum ada yang masuk terminal supaya bangunan tetap terawat dengan baik.
  6. Tetap melanjutkan progres pembangunan Terminal Barang Untuk Umum sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015, akan tetapi karena terdapat keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan diprioritaskan pada Terminal Barang Untuk Umum yang memiliki permintaan/demand yang cukup besar.
  7. Koordinasi dengan pihak terkait khususnya instansi yang membidangi Immigration, Customs, Quarantine and Security (ICQS) dikarenakan operasional Terminal Barang Untuk Umum yang menangani ekspor impor harus memiliki izin ICQS.
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan  
Beberapa hal yang dapat menjadi potensi kegagalan dalam mencapai target pada indikator kinerja kegiatan ini, meliputi:
  1. Jumlah SDM yang mengoperasikan terminal antara terminal yang satu dengan terminal yang lainnya tidak sesuai porsi kebutuhannya, sehingga terdapat beberapa terminal yang memiliki jumlah personil yg cukup akan tetapi masih banyak terminal yang masih kekurangan petugas.
  2. Terdapat backlog kegiatan sehingga belum ada penambahan jumlah terminal baru yang beroperasi.
  3. Masih kurangnya meratanya jumlah SDM di Terminal Tipe A;
  4. Terdapat kendala operasional kendaraan barang belum masuk ke terminal dikarenakan kesepakatan dengan negara lain masih dalam proses administrasi dan pembangunan jalan khusus belum selesai dibangun.
  5. Terdapat backlog kegiatan pembangunan Terminal Barang Untuk Umum lanjutan karena keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan tidak dapat dilaksanakan pada semua terminal yang belum selesai dibangun.
  6. Operasional kendaraan barang masuk ke Terminal Barang Untuk Umum tergantung pada kesepakatan antara 2 negara setuju untuk membuka perbatasan untuk dilewati kendaraan barang lintas negara.
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja  
Berdasarkan data Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada target Perjanjian Kinerja tahun 2022, terdapat 104 lokasi terminal yang beroperasi dimana target tersebut telah terpenuhi pada tahun 2022, sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 telah sesuai dengan target renstra dan target PK Tahun 2022. Berikut ini adalah daftar Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi berdasarkan target PK pada Tahun 2022 dan hasil dari kegiatan monitoring operasional Terminal Penumpang Tipe A:
  1. Terminal Langsa
  2. Terminal Lhokseumawe
  3. Terminal Meulaboh
  4. Terminal Batoh
  5. Terminal Paya Ilang
  6. Terminal Tanjung Pinggir
  7. Terminal Madya Tarutung
  8. Terminal Sibolga
  9. Terminal Amplas



10. Terminal Pinang Baris
11. Terminal Anak Air
12. Terminal Kiliran Jao
13. Terminal Bareh Solok
14. Terminal Simpang Aur
15. Terminal Jati Pariaman
16. Terminal Bangkinang
17. Terminal Payung Sekaki
18. Terminal Dumai
19. Terminal Alam Barajo
20. Terminal Muara Bungo
21. Terminal Pulau Tujuh Bangko
22. Terminal Sribulan
23. Terminal Alang-Alang Lebar
24. Terminal Kayuagung
25. Terminal Batu Kuning
26. Terminal Betung
27. Terminal Karya Jaya
28. Terminal Simpang Periuk
29. Terminal Batay
30. Terminal Simpang Nangka
31. Terminal Rajabasa
32. Terminal Pakupatan
33. Terminal Labuan
34. Terminal Mandala Lebak
35. Terminal Merak
36. Terminal KH. Ahmad Sanusi
37. Terminal Ciakar
38. Terminal Guntur Melati Garut
39. Terminal Harjamukti
40. Terminal Indihiang
41. Terminal Kertawangunan
42. Terminal Subang
43. Terminal Banjar
44. Terminal Cikampek
45. Terminal Leuwipanjang
46. Terminal Purworejo
47. Terminal Cepu
48. Terminal Bangsa Mbangun Desa
49. Terminal Giri Adipura
50. Terminal Ir. Soekarno
51. Terminal Kebumen
52. Terminal Mangkang
53. Terminal Pekalongan
54. Terminal Induk Pematang
55. Terminal Bulupitu Purwokerto
56. Terminal Mendolo
57. Terminal Bawen
58. Terminal Tidar
59. Terminal Tingkir
60. Terminal Tirtonadi
61. Terminal Jati
62. Terminal Bobot Sari
63. Terminal Tegal



64. Terminal Jepara
65. Terminal Giwangan
66. Terminal Dhaksinarga
67. Terminal Arjosari
68. Terminal Arya Wiraraja
69. Terminal Banyuwangga
70. Terminal Gayatri
71. Terminal Kertonegoro
72. Terminal Pacitan
73. Terminal Patria
74. Terminal Purboyo
75. Terminal Selo Aji
76. Terminal Tamanan
77. Terminal Tawangalun
78. Terminal Surodakan
79. Terminal Rajekwesi
80. Terminal Pandaan Pasuruan
81. Terminal Kambang Putih
82. Terminal Mengwi
83. Terminal Mandalika
84. Terminal Sumer Payung
85. Terminal Dara
86. Terminal Sei Ambawang
87. Terminal W.A. Gara
88. Terminal Gambut Barakat
89. Terminal Batu Ampar
90. Terminal Samarinda Seberang
91. Terminal Induk Lumpue
92. Terminal Latenri Sessu Pekkae
93. Terminal Petta Pongawai
94. Terminal Simbuang
95. Terminal Tipalayo
96. Terminal Kasintuwu
97. Terminal Mamboro
98. Terminal Boroko
99. Terminal Tangkoko
100. Terminal Puuwatu
101. Terminal Isimu
102. Terminal Duingingi
103. Terminal Entrop
104. Terminal Entikong

Sehingga:

*Jumlah TTA & TB yang beroperasi*

*= Jumlah TTA yang Beroperasi*

*+ Jumlah TB yang beroperasi = 104*



- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja  
Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi Triwulan II Tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{104}{104} \times 100\% = 100\%$$

- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan  
Berdasarkan DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2022, Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi adalah Kegiatan Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 610.300.000,- dengan realisasi hingga Triwulan II sebesar Rp. 52.980.000,- atau mencapai 8,68%.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang  
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :
1. Menetapkan lokasi terminal tipe A dan terminal barang baru sesuai dengan skala prioritas berdasarkan hasil pengkajian lebih lanjut;
  2. Meningkatkan kegiatan monitoring operasional Terminal Penumpang Tipe A untuk memperluas cakupan pengawasan pada kegiatan pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A dan Terminal Barang.
  3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

### **II.2.1.3. IKK 3 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda**

#### **a.1 Definisi Indikator Kinerja**

Berdasarkan PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan. Fasilitas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat. Kawasan Strategis Nasional (KSN) prioritas yang direncanakan untuk diakomodir akan dilayani meliputi 10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN dengan total 69 wilayah KSN. Adapun daftar Kawasan prioritas dimaksud adalah sebagai berikut terdiri dari:

#### **10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)**

1. KSPN Danau Toba;
2. KSPN Bangka Belitung;
3. KSPN Borobudur;



4. KSPN Bromo Tengger Semeru;
5. KSPN Mandalika;
6. KSPN Labuan Bajo;
7. KSPN Likupang;
8. KSPN Wakatobi;
9. KSPN Morotai;
10. KSPN Raja Ampat.

#### **9 Kawasan Industri (KI)**

1. KI Sei Mangkei;
2. KI Galang Batang;
3. KI Bintang Aerospace;
4. KI Sadai;
5. KI Ketapang
6. KI Surya Borneo;
7. KI Palu;
8. KI Teluk Weda;
9. KI Teluk Bintuni

#### **8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)**

1. KPBPB Sabang;
2. KEK Arun Lhokseumawe;
3. KPBPB Batam Bintang Karimun;
4. KEK Tanjung Lesung;
5. KEK Mandalika\*;
6. KEK MBTK;
7. KEK Bitung;
8. KEK Morotai;

#### **42 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berdasarkan PP 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional:**

1. Banda Aceh;
2. Mebidangro;
3. Padang-Lubuk Agung-Pariaman;
4. Pekanbaru;
5. Dumai;
6. Batam;
7. Jambi;
8. Palembang dsk;
9. Bengkulu;
10. Pangkal Pinang;
11. Bandar Lampung;
12. Jabodetabek;
13. Serang;
14. Cilegon;
15. Bandung Raya;
16. Cirebon;
17. Surakarta;
18. Kedungsepur;
19. Cilacap;
20. Yogyakarta;
21. Gerbangkertosusilo;
22. Malang;
23. Sarbagita;



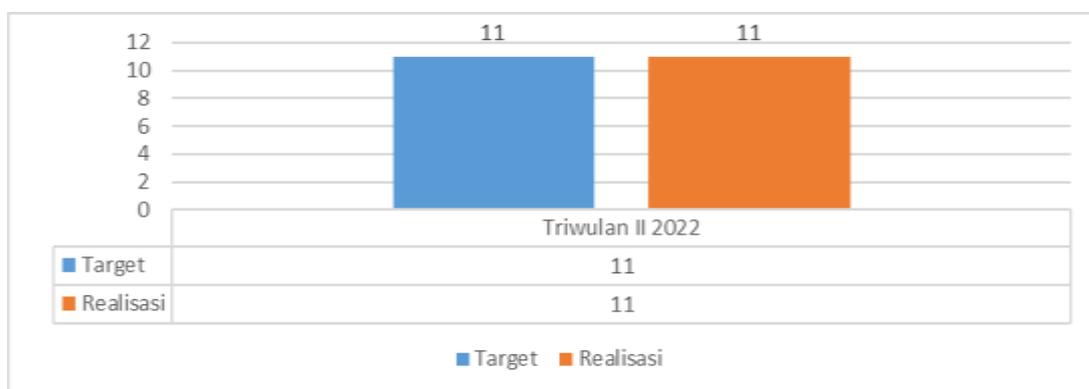
24. Mataram Raya;
25. Kupang;
26. Pontianak;
27. Palangkaraya;
28. Banjarmasin dsk;
29. Balikpapan-Samarinda-Bontang;
30. Tarakan;
31. Gorontalo;
32. Manado;
33. Bitung;
34. Palu;
35. Maminasata;
36. Kendari;
37. Ambon;
38. Ternate;
39. Sorong;
40. Timika;
41. Jayapura;
42. Merauke.

Untuk menghitung IKK Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda} \\ = \text{Fasilitas Pendukung dan Integrasi moda yang sudah terbangun pada lokasi KSN Th 2020 s.d Th ke n}$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Realisasi IKK Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Triwulan II tahun 2022 sebesar 11 lokasi, jika dibandingkan dengan target PK 2 tahun 2022 sebesar 11 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda.



a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum  
Rencana penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda di KSPN dan KSN sampai dengan tahun 2022 berdasarkan pada :



1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
  2. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional; dan
  3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024
- Narasi Kronologi Target  
Sehubungan dengan adanya penyesuaian target antara renstra dengan kegiatan pada DIPA Ditjen Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2022 tersebut, maka untuk target jumlah penyediaan fasilitas pendukung & integrasi moda tahun 2022 yang semula sebanyak 15 Lokasi pada renstra berubah menjadi 11 lokasi pada perjanjian kinerja tahun 2022, karena ada 4 lokasi tidak dianggarkan pada DIPA.
  - Narasi Faktor Keberhasilan  
Berdasarkan rencana pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, ada sebanyak 11 (sebelas) lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda, yakni: Pembangunan Fasilitas Pendukung di KSPN Mandalika tahun 2021 dan 2022, Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Magelang, Purworejo, Surakarta, Klaten, Salatiga, Palembang, Pekanbaru, Danau Toba dan Borobudur.  
Berikut ini adalah daftar fasilitas pendukung dan integrasi moda yang sudah terbangun s.d Tahun 2022 berdasarkan realisasi PK pada Triwulan II Tahun 2022 dan hasil dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda serta Survey Inventarisasi dan Pendataan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan :
    1. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika dan Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika (mendukung penyelenggaraan Moto GP tahun 2022);
    2. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Magelang;
    3. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Purworejo;
    4. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Surakarta;
    5. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Klaten;
    6. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Salatiga;
    7. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Palembang;
    8. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kota Pekanbaru.
    9. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba
    10. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur
    11. Pembangunan Fasilitas Pendukung pada Angkutan Perkotaan skema Buy The Service di Denpasar.

Dari 11 (sebelas) lokasi penyediaan fasilitas pendukung, terdapat 11 (sebelas) lokasi sudah terealisasi yang berada di 7 (tujuh) kawasan. Dari 11 (sebelas) lokasi, yang sudah selesai terbangun sebanyak 8 lokasi, yaitu Mandalika, Magelang, Purworejo, Surakarta, Klaten, Salatiga, Palembang dan Pekanbaru.



Sedangkan untuk pembangunan yang masih dalam proses ada 3 (tiga) lokasi, yaitu Danau Toba, Borobudur, dan Denpasar.

Berikut adalah faktor keberhasilan dalam mencapai target IKK ini :

1. Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda;
2. Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional;
3. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh BPTD.

- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

Berikut adalah potensi kegagalan yang dapat menghambat tercapainya target yang ditetapkan:

1. Koordinasi perijinan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) terkait titik lokasi pembangunan fasilitas pendukung yang berada diatas bahu jalan;
2. Perubahan rute angkutan umum di wilayah KSPN menyebabkan perubahan titik lokasi fasilitas pendukung;
3. Adanya refocusing anggaran pada tahun 2021 sehingga terdapat 1 kegiatan yang tidak terlaksana yaitu pembangunan fasilitas pendukung di Palembang;
4. Adanya pengurangan anggaran sehingga menyebabkan pengurangan jumlah lokasi penyediaan fasilitas pendukung & integrasi moda.

- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja dapat disimpulkan bahwa target perjanjian kinerja tahun 2022 ada sebanyak 11 lokasi dengan realisasampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 9 Lokasi. Sehingga:

*Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda = Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda yang terbangun pada lokasi KSN Th 2020 s.d Th 2022 = 11 lokasi*

- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Triwulan II tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$$

- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Kegiatan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang dapat mendukung tercapainya kinerja kegiatan ini yaitu:



1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda,-
2. Survey dan Monitoring Simpul-Simpul Transportasi di KSPN;
3. Survey Inventarisasi dan Pendataan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan;

Dengan total Pagu Anggaran sebesar RP. 749.999.000,- dan realisasi keuangan per Triwulan II sebesar Rp.187.267.740,- dengan capaian keuangan sebesar 24,97%.

a.4.Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan percepatan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda pada lokasi yang sudah menjadi target pembangunan pada renstra;
2. Meningkatkan kegiatan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda serta Survey Inventarisasi dan Pendataan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

## II.2.2 SK2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

- Uraian Sasaran Kegiatan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A;
2. IKK 2. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A;
3. IKK 3. Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A

### II.2.2.1 IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A

a.1 Definisi Indikator Kinerja

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan nilai capaian kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh publik dimana nilai capaian / Indeks Kepuasan dimaksud diperoleh melalui pelaksanaan Survei yang disebut Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan transportasi darat adalah metode untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik transportasi darat yang terdiri atas penyelenggaraan angkutan jalan dan angkutan penyeberangan.



Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terminal Tipe A menggunakan Proses perumusan Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat meliputi:

#### 1. Aspek Penilaian

Penilaian publik atas penyelenggaraan transportasi darat melalui aplikasi 3A IPK-IKM atau Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dapat diakses melalui [www.skm.dephub.go.id](http://www.skm.dephub.go.id). Unsur penilaian SKM meliputi:

- 1) Persyaratan, Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- 3) Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- 4) Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- 5) Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
- 6) Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 7) Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
- 8) Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
- 9) Penanganan Pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
- 10) Sarana dan Prasarana, Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

#### 2. Pembobotan Nilai

Untuk memperoleh nilai Survei Kepuasan Masyarakat unit pelayanan digunakan pendekatan sebagai berikut:

Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 - 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$



Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan;
2. memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel II. 1 Nilai Resepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Keterangan Tabel : Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

### 3. Parameter

Pada tahun 2021 Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan aplikasi 3A IPK-IKM dengan rumus hitung dan unturnya sesuai dengan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Aplikasi 3A ditujukan untuk melakukan survei cepat penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan menggunakan asumsi penentuan target yang merujuk pada target sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 menggunakan asumsi dari pemenuhan Dokumen Standar Pelayanan;
2. Pada tahun 2022 menggunakan asumsi telah dilaksanakan reuiu dokumen Standar Pelayanan dan Penerapan SPBE;
3. Pada tahun 2023 menggunakan asumsi pelaksanaan implementasi Road Map TIK untuk pelayanan; dan
4. Pada tahun 2024 menggunakan asumsi dari optimalisasi pelayanan pada penerapan SPBE.

Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Layanan0020dan dilakukan oleh Para Pengguna Layanan.

### 4. Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. sedangkan untuk besaran sampel dan



populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan** atau dihitung dengan menggunakan rumus:

$$S = \frac{\{\lambda^2 . N . P . Q\}}{\{d^2(N - 1) + \lambda^2 . P . Q\}}$$

dimana :

S = jumlah sampel

$\lambda^2$  = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

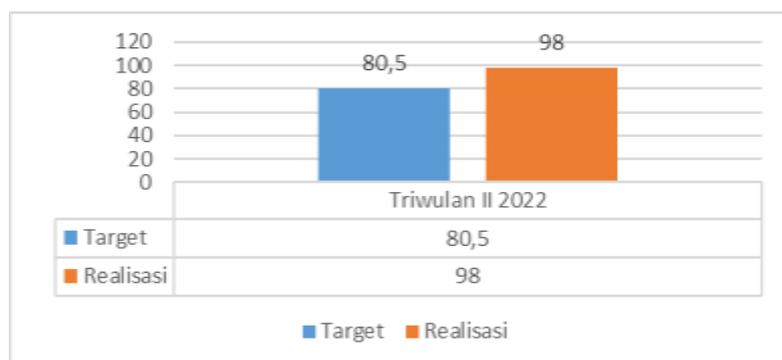
d = 0,0

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pada Tahun 2022 Triwulan II Indeks Kinerja Pelayanan terhadap Terminal Tipe A di targetkan mencapai nilai 80,5 berdasarkan target Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024, dalam upaya mencapai target pelayanan Terminal Tipe A di peroleh realisasi kinerja pelayanan pada penyelenggaraan angkutan jalan dan angkutan penyeberangan berdasarkan aspek-aspek pelayanan yang tertuang pada dokumen standar pelayanan dan penerapan SPBE, serta di nilai melalui pelaksanaan Survei Kepuasan masyarakat atas standar pelayanan yang telah di ditetapkan sehingga di peroleh Indeks Kepuasan Masyarakat.

Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat yang telah terakomodir pada aplikasi 3A IPK-IKM dan dapat di akses melalui alamat [www.skm.dephub.go.id](http://www.skm.dephub.go.id)

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A pada Triwulan II tahun 2022 sebesar 98, jika dibandingkan dengan target PK tahun 2022 sebesar 80,5 maka capaian kinerja mencapai 121,74%. Berdasarkan capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi pada Triwulan II sudah melebihi target pada PK Tahun 2022.





### a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area peningkatan pelayanan publik tahun 2022 Triwulan II, Kementerian Perhubungan telah melaksanakan survey pada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan khususnya Satuan Pelayanan Terminal Tipe A dengan menggunakan Aplikasi. Survey tersebut dilaksanakan untuk mengukur Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada penggunajasa / stakeholders pada unit layanan Ditjen Perhubungan Darat yang mengacu pada kepada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

- Narasi Kronologi Target

Tahun 2022 Triwulan II, Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Terminal Tipe A memiliki target 80.5 yang diperoleh dari Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan asumsi proyeksi pimpinan pada rapat Rencana Strategis 2020-2024.

Pada tahun 2022 pelaksanaan SKM masih menggunakan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi 3A IPK-IKM dan masih berfokus pada pendampingan dan supervisi atas pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dimaksud kepada petugas layanan dan target Survei itu sendiri yaitu seluruh pengguna layanan. sehingga masih banyak kendala yang dihadapi baik dari sisi pemahaman petugas pelaksana layanan maupun dari sisi pemahaman pengguna jasa yang menyebabkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Terminal Tipe A tahun 2022 Triwulan II sudah mencapai 98.

Perolehan capaian nilai 98 merupakan hasil konversi dari Indeks Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM terhadap range nilai yang terdapat pada Aplikasi 3A IPK-IKM, tabel range dimaksud sebagai berikut:

Capaian Nilai 98 diperoleh dari :

*Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A*  
= Rekapitulasi hasil survey IKM pada Terminal Penumpang Tipe A = 98

$$\frac{\text{Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat}}{\text{Nilai Maksimum Persepsi Layanan}} \times 100$$



$$\frac{19,6}{20} \times 100 = 98$$

Capaian 98 bila disesuaikan pada tabel range akan diperoleh predikat kinerja unit pelayanan pada tingkat Sangat baik.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**  
Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi factor keberhasilan sebagai berikut :
  1. Perbaikan layanan antara lain perbaikan sarana dan prasarana;
  2. Mensosialisasikan informasi terkait prosedur layanan dan produk layanan yang ada secara bertahap serta penerapan pelayanan yang berkualitas pada pengguna jasa;
  3. Meningkatnya capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Terminal Tipe A tahun 2022 Triwulan II menjadi 98;
  4. Tersedianya aplikasi Aplikasi 3A IPK-IKM untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi pelayanan yang dirasakan oleh pengguna jasa Terminal Tipe A.
  
- **Narasi Faktor Kegagalan atau potensi kegagalan**  
Dalam mencapai kinerja pelayanan Terminal Tipe A masih di temukan banyak permasalahan, yang selama tahun 2022 masih belum sepenuhnya teratasi, adapun permasalahan yang banyak di temukan pada unit pelayanan publik sebagai berikut:
  1. Persyaratan teknis maupun administratif yang dianggap belum memudahkan para pengguna layanan;
  2. Prosedur yang dianggap tidak mudah untuk diikuti oleh pengguna layanan;
  3. Layanan pengaduan yang masih belum tersedia;
  4. Masih terdapat banyak satuan pelaksana yang belum melakukan survey IKM, sehingga hasil rekapitulasi yang diperoleh tidak maksimal.
  5. Masih didapati pengguna jasa yang belum seluruhnya mendapatkan kualitas pelayanan yang baik salah satunya yaitu belum mendapatkan informasi secara lengkap terkait prosedur layanan serta petugas pelaksana belum sepenuhnya mendapatkan pemahaman secara lengkap terkait prosedur layanan serta penerapan pelaksanaan pelayanan yang berkualitas pada pengguna jasa;
  
- **Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja**  
Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A pada Triwulan II tahun 2022 yang diisi oleh koresponden pada satuan pelayanan Terminal Tipe A yang beroperasi, melalui aplikasi Case Management System IKM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, diperoleh hasil rekapitulasi rata-rata nilai IKM sebesar 98%.  
Berdasarkan hasil rekapitulasi, dari 104 Terminal Tipe A yang beroperasi, hanya 8 Terminal Tipe A yang melakukan survey IKM pada pada Triwulan II Tahun 2022.

Sehingga:



*Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A*

= Rekapitulasi hasil survey IKM pada Terminal Penumpang Tipe A  
= 98

$$\frac{\text{Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat}}{\text{Nilai Maksimum Persepsi Layanan}} \times 100$$

$$\frac{19,6}{20} \times 100 = 98$$

- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja  
Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A pada Triwulan II tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{98}{80,5} \times 100\% = 121,74\%$$

- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan  
Adapun anggaran terkait Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A tahun 2022 yaitu senilai Rp. 0,- dengan realisasi hingga akhir tahun senilai Rp. 0,- dikarenakan untuk IKK Indeks Kepuasan Masyarakat belum dianggarkan.
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang  
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu
1. Melakukan koordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat dan Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A agar secara rutin melakukan survey IKM dengan melakukan survey koresponden melalui Aplikasi Case Management System IKM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang telah disediakan dengan cara mengisi kuesioner melalui link dan scan QRcode yang telah disediakan.
  2. Seluruh satpel Terminal Tipe A dapat melakukan survey koresponden secara rutin sehingga dapat mengetahui kondisi secara keseluruhan hasil dari survey IKM tersebut.
  3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang;

### **II.2.2.2 IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A**

- a.1. Definisi Indikator Kinerja  
Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A yang terpenuhi adalah rata – rata dari persentase pemenuhan SPM pada Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.



Berdasarkan Permenhub Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Standar Pelayanan Terminal Penumpang Tipe-A mencakup:

- (1) Pelayanan Keselamatan;
- (2) Pelayanan Keamanan;
- (3) Pelayanan Keandalan/Keteraturan;
- (4) Pelayanan Kenyamanan;
- (5) Pelayanan Kemudahan/Keterjangkauan;
- (6) Pelayanan Kesetaraan.

**Tabel** Matriks Penilaian (SPMT<sub>n</sub>) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015

Matriks Penilaian (SPM <sub>Tn</sub> ) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:		
NO	ASPEK PENGUKURAN	NILAI (POINT)
<b>ASPEK PELAYANAN KESELAMATAN (AP<sub>keselamatan</sub>)</b>		
1	<b>Lajur Pejalan Kaki</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lajur pejalan kaki yang meminimalkan <i>crossing</i> dengan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	<b>Fasilitas Keselamatan Jalan</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, penerangan jalan umum, pagar). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	<b>Jalur Evakuasi</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
4	<b>Alat Pemadam Kebakaran</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia alat pemadam kebakaran. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
5	<b>Pos, fasilitas dan petugas kesehatan</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas kesehatan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
6	<b>Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
7	<b>Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
8	<b>Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan)</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
9	<b>Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan fasilitas untuk	2



	penanganan darurat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	
10	<b>Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
<b>ASPEK PELAYANAN KEAMANAN (AP<sub>keamanan</sub>)</b>		
1	<b>Fasilitas pencegah tindak kriminal</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas pencegah tindak kriminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	<b>Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat.</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	<b>Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
<b>ASPEK PELAYANAN KEANDALAN/KETERATURAN (AP<sub>keandalan</sub>)</b>		
1	<b>Ketersediaan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis.</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	<b>Keteraturan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis</b> Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
3	<b>Ketersediaan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis.</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
4	<b>Keteraturan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis.</b> Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
5	<b>Ketersediaan Loket tempat calon penumpang membeli tiket</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Loket tempat calon penumpang membeli tiket. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
6	<b>Keteraturan Loket tempat calon penumpang membeli tiket</b> Nilai 1 (satu) point apabila Loket tempat calon penumpang membeli tiket teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	1
7	<b>Ketersediaan Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang</b>	2



	<p><b>kontrol dan SIM terminal.</b></p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	
8	<p><b>Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai).</b></p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai) sesuai. Nilai 0 (nol) apabila tidak sesuai.</p>	2
9	<p><b>Ketersediaan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal.</b></p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
10	<p><b>Keteraturan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal.</b></p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.</p>	2
<b>ASPEK PELAYANAN KENYAMANAN (AP<sub>kenyamanan</sub>)</b>		
1	<p><b>Ketersediaan tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka)</b></p> <p><b>Dukungan pembaca layar diaktifkan.</b></p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka)</p> <p>Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
2	<p><b>Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal.</b></p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak bersih.</p>	2
3	<p><b>Keteraturan di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona)</b></p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.</p>	2
4	<p><b>Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel).</b></p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
5	<p><b>Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas. 2 wastafel).</b></p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas. 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
6	<p><b>Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal)</b></p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak</p>	2



	berbau yang berasal dari dalam area terminal) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	
7	<b>Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas)</b> Nilai 2 (dua) point apabila Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
8	<b>Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas)</b> Nilai 2 (dua) point apabila Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
9	<b>Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal</b> Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	<b>Ketersediaan alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau.</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
11	<b>Tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	<b>Kondisi ruang terbuka hijau, Tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah.</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	<b>Ketersediaan Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
14	<b>Ketersediaan Fasilitas dan petugas kebersihan</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas dan petugas kebersihan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
15	<b>Ketersediaan Tempat istirahat awak kendaraan</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Tempat istirahat awak kendaraan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
16	<b>Ketersediaan Area merokok (smoking area)</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area merokok (smoking area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
17	<b>Ketersediaan Drainase yang memadai</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Drainase yang memadai. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
18	<b>Ketersediaan Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area)</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
19	<b>Ketersediaan Ruang baca (reading corner)</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang baca (reading corner). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
20	<b>Tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lampu penerangan ruangan dengan	2



	intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	
<b>ASPEK PELAYANAN KEMUDAHAN/KETERJANGKAUAN (AP<sup>kemudahan</sup>)</b>		
1	<b>Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur</b> Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
2	<b>Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang</b> Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpisah.	1
3	<b>Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain</b> Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
4	<b>Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur</b> Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
5	<b>Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang</b> Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
6	<b>Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain</b> Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
7	<b>Visual Informasi Pelayanan, antara lain : Denah/Layout terminal, Nomor trayek, nama PO dan Kelas Pelayanannya, Nama terminal keberangkatan, Jadwal, tarif dan Peta Jaringan. (Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk dan di ruang tunggu umum, mudah dilihat dan jelas terbaca)</b> Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
8	<b>Audio informasi pelayanan, antara lain : informasi pelayanan dan Kejadian khusus dan gangguan. Diletakkan ditempat yang mudah didengar oleh pengguna jasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada</b> Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
9	<b>Informasi angkutan lanjutan yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat: Jenis angkutan, Lokasi angkutan, Jam pelayanan angkutan lanjutan, Jurusan/rute, Tarif. Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca.</b> Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	<b>Informasi gangguan perjalanan mobil bus diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada</b> Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2



11	<b>Ketersediaan Tempat penitipan barang</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	<b>Ketersediaan Fasilitas pengisian baterai (charging corner)</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	<b>Aksesibilitas Tempat naik / turun penumpang Memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus.</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
14	<b>Ketersediaan Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
<b>ASPEK PELAYANAN KESETARAAN (AP<sup>kesetaraan</sup>)</b>		
1	<b>Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel)</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
2	<b>Ketersediaan Ruang ibu menyusui</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang ibu menyusui. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
<b>Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terminal</b>		100

Sehingga :

$$SPM_{TTA} = \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

$$IKK_n = \frac{\sum SP_{T1} + SP_{T2} + \dots + SP_{Tn}}{n}$$

**Note:**

\*Monitoring dilaksanakan pada saat Proses rehabilitasi selesai dilaksanakan pada tahun (n)

SPM TTA = Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan (SP) pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A (TTA) yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

n = Jumlah Terminal yang beroperasi

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A pada Triwulan II tahun 2022 sebesar 53,6%, jika dibandingkan dengan target PK tahun 2022 sebesar 53,65% maka capaian kinerja mencapai 99,91%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A.



a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dan Balai Pengelola Transportasi Darat telah melakukan revitalisasi terhadap Terminal Penumpang Tipe A sehingga mengakibatkan persentase SPM Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat meningkat karena adanya penambahan dan perbaikan fasilitas umum dan penunjang sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Sesuai dengan Pagu Anggaran tahun ini, untuk kegiatan yang mendukung terlaksananya capaian kinerja ini adalah Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Kebumen (termasuk supervisi) dan Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Operasional Terminal Angkutan Jalan.

**Tabel II.6** Matriks Penilaian (SPMTn) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015

Matriks Penilaian (SPMTn) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:		
NO	ASPEK PENGUKURAN	NILAI (POINT)
<b>ASPEK PELAYANAN KESELAMATAN (AP<sub>keselamatan</sub>)</b>		
	<b>Lajur Pejalan Kaki</b>	
1	Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lajur pejalan kaki yang meminimalkan <i>crossing</i> dengan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
	<b>Fasilitas Keselamatan Jalan</b>	
2	Nilai 2 (dua) point apabila tersedia fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, penerangan jalan umum, pagar). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
	<b>Jalur Evakuasi</b>	
3	Nilai 2 (dua) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
	<b>Alat Pemadam Kebakaran</b>	
4	Nilai 2 (dua) point apabila tersedia alat pemadam kebakaran. Nilai 0 (nol)	2



	apabila tidak tersedia.	
5	<b>Pos, fasilitas dan petugas kesehatan</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas kesehatan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
6	<b>Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
7	<b>Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
8	<b>Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan)</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
9	<b>Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	<b>Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
<b>ASPEK PELAYANAN KEAMANAN (AP<sub>keamanan</sub>)</b>		
1	<b>Fasilitas pencegah tindak kriminal</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas pencegah tindak kriminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	<b>Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat.</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	<b>Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
<b>ASPEK PELAYANAN KEANDALAN/KETERATURAN (AP<sub>keandalan</sub>)</b>		
1	<b>Ketersediaan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis.</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	<b>Keteraturan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis</b> Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2



3	<p><b>Ketersediaan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis.</b></p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
4	<p><b>Keteraturan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis.</b></p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.</p>	2
5	<p><b>Ketersediaan Loker tempat calon penumpang membeli tiket</b></p> <p>Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Loker tempat calon penumpang membeli tiket. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	1
6	<p><b>Keteraturan Loker tempat calon penumpang membeli tiket</b></p> <p>Nilai 1 (satu) point apabila Loker tempat calon penumpang membeli tiket teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.</p>	1
7	<p><b>Ketersediaan Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal.</b></p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
8	<p><b>Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai).</b></p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai) sesuai. Nilai 0 (nol) apabila tidak sesuai.</p>	2
9	<p><b>Ketersediaan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal.</b></p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
10	<p><b>Keteraturan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal.</b></p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.</p>	2
<b>ASPEK PELAYANAN KENYAMANAN (AP<sub>kenyamanan</sub>)</b>		
1	<p><b>Ketersediaan tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka)</b></p> <p><b>Dukungan pembaca layar diaktifkan.</b></p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka)</p> <p>Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
2	<p><b>Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal.</b></p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan</p>	2



	tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak bersih.	
3	<b>Keteraturan di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona)</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
4	<b>Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel).</b> Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
5	<b>Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas. 2 wastafel).</b> Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas. 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
6	<b>Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal)</b> Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
7	<b>Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas)</b> Nilai 2 (dua) point apabila Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
8	<b>Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas)</b> Nilai 2 (dua) point apabila Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
9	<b>Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal</b> Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	<b>Ketersediaan alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau.</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
11	<b>Tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	<b>Kondisi ruang terbuka hijau, Tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah.</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	<b>Ketersediaan Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
14	<b>Ketersediaan Fasilitas dan petugas kebersihan</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas dan petugas kebersihan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2



15	<b>Ketersediaan Tempat istirahat awak kendaraan</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Tempat istirahat awak kendaraan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
16	<b>Ketersediaan Area merokok (smoking area)</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area merokok (smoking area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
17	<b>Ketersediaan Drainase yang memadai</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Drainase yang memadai. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
18	<b>Ketersediaan Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area)</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
19	<b>Ketersediaan Ruang baca (reading corner)</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang baca (reading corner). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
20	<b>Tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
<b>ASPEK PELAYANAN KEMUDAHAN/KETERJANGKAUAN (AP<sub>kemudahan</sub>)</b>		
1	<b>Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur</b> Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
2	<b>Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang</b> Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpisah.	1
3	<b>Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain</b> Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
4	<b>Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur</b> Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
5	<b>Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang</b> Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
6	<b>Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain</b> Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
7	<b>Visual Informasi Pelayanan, antara lain : Denah/Layout terminal, Nomor trayek, nama PO dan Kelas Pelayanannya, Nama terminal keberangkatan, Jadwal, tarif dan Peta Jaringan. (Diletakkan di tempat</b>	2



	<p>yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk dan di tuang tunggu umum, mudah dilihat dan jelas terbaca)</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	
8	<p><b>Audio informasi pelayanan, antara lain : informasi pelayanan dan Kejadian khusus dan gangguan. Diletakkan ditempat yang mudah didengar oleh pengguna jasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada</b></p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
9	<p><b>Informasi angkutan lanjutan yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat: Jenis angkutan, Lokasi angkutan, Jam pelayanan angkutan lanjutan, Jurusan/rute, Tarif. Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca.</b></p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
10	<p><b>Informasi gangguan perjalanan mobil bus diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada</b></p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
11	<p><b>Ketersediaan Tempat penitipan barang</b></p> <p>Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	1
12	<p><b>Ketersediaan Fasilitas pengisian baterai (charging corner)</b></p> <p>Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	1
13	<p><b>Aksesibilitas Tempat naik / turun penumpang Memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus.</b></p> <p>Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	1
14	<p><b>Ketersediaan Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)</b></p> <p>Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	1
<b>ASPE PELAYANAN KESETARAAN (AP<sub>kesetaraan</sub>)</b>		
1	<p><b>Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel)</b></p> <p>Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	1
2	<p><b>Ketersediaan Ruang ibu menyusui</b></p> <p>Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang ibu menyusui. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	1
<b>Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terminal</b>		100

- Narasi Faktor Keberhasilan

Faktor Keberhasilan untuk mencapai target yang telah ditetapkan meliputi :

- Melakukan rehabilitasi dan peningkatan Terminal Tipe A sebanyak mungkin agar standar terminal bisa merata.
- Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis ataupun Training kepada Satuan Pelayanan Terminal.
- Melaksanakan kegiatan pelayanan prima pada Terminal
- Melakukan evaluasi paruh waktu renstra



- Narasi Faktor Kegagalan atau potensi kegagalan:
  1. Terdapat backlog kegiatan, yang semula terencana menjadi tidak terlaksana;
  2. Adanya kerusakan pada fasilitas fisik terminal karena kurang maksimalnya perawatan terminal;
  3. Masih terdapat kekurangan SDM pada beberapa terminal.

- Narasi dan perhitungan realisasi capaian kinerja  
Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A pada Triwulan II tahun 2022 sebesar 53,6%, jika dibandingkan dengan target PK tahun 2022 sebesar 53,65% maka capaian kinerja mencapai 99,91%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A.  
Sehingga :

$$SPM_{TTA} = \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

$$IKK_n = \frac{\sum SP_{T1} + SP_{T2} + \dots + SP_{Tn}}{n}$$

**Note:**

\*Monitoring dilaksanakan pada saat Proses rehabilitasi selesai dilaksanakan pada tahun (n)  
SPM TTA = Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan (SP) pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A (TTA) yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat  
n = Jumlah Terminal yang beroperasi

$$\% \text{ Capaian} = 53,6 / 53,65 \times 100\% = 99,91\%$$

Kegiatan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang dapat mendukung tercapainya kinerja kegiatan ini yaitu :

1. Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Kebumen (termasuk supervisi);
2. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Operasional Terminal Angkutan Jalan;

Dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 20.557.340.000,- dan realisasi keuangan per Triwulan II sebesar Rp. 19.445.321.018,- (94,59%).

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang  
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :
  1. Melakukan percepatan kegiatan revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A sehingga hasil persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A dapat meningkat.
  2. Melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Terminal Tipe A.



3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang

### II.2.2.3 IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A

#### a.1 Definisi Indikator Kinerja

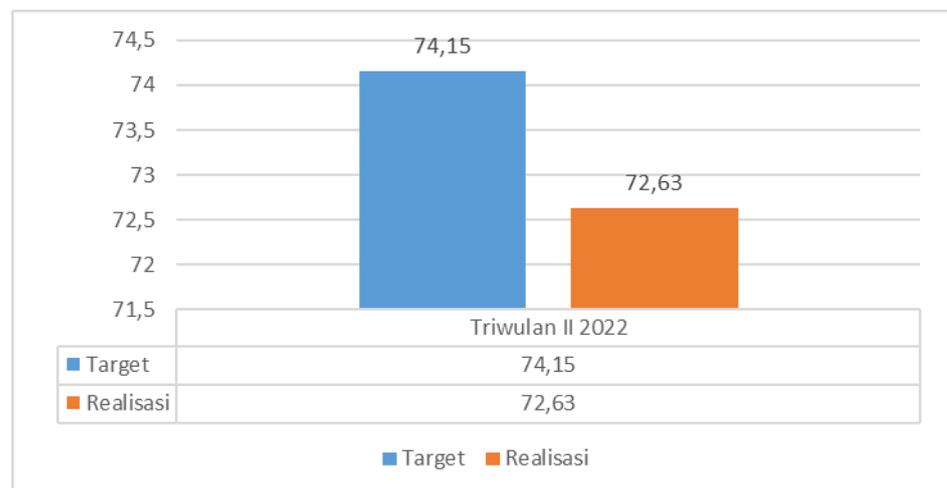
Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A merupakan perbandingan antara persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang melaporkan operasional secara online (bobot 50%) ditambah dengan persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal (bobot 50%). Perangkat digitalisasi yang dipasang terdiri atas 7 (tujuh) item, yaitu : vending machine, passenger barrier gate, vehicle barrier gate, CCTV, counting passenger, information display.

Untuk menghitung IKK Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A digunakan rumus sebagai berikut:

$$\%Penerapan\ Smart\ Terminal = \left[ \frac{Jumlah\ TTA\ Yang\ Melaporkan\ Operasional\ Secara\ Online}{Jumlah\ TTA\ kewenangan\ Ditjen\ Hubdat\ yang\ Beroperasi} \times 74\% \right] + \left[ \frac{Jumlah\ terminal\ dipasang\ mesin\ check\ in\ ticket\ dan\ passenger\ gate}{Jumlah\ TTA\ kewenangan\ Ditjen\ Hubdat\ yang\ Beroperasi} \times 8,4\% \right] + \left[ \frac{Jumlah\ terminal\ dipasang\ vehicle\ gate,\ digital\ information,\ cctv}{Jumlah\ TTA\ kewenangan\ Ditjen\ Hubdat\ yang\ Beroperasi} \times 17,6\% \right]$$

#### a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Realisasi Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A pada Triwulan II tahun 2022 sebesar 72,63, jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2022 sebesar 74,15 maka capaian kinerja mencapai 97,95%. Berdasarkan capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi pada Triwulan II masih belum melebihi target PK Tahun 2022. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A.





### a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Berdasarkan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A pada Triwulan II tahun 2022 diperoleh realisasi sebesar 72,63 dimana capaian tersebut masih belum melebihi target sebesar 74,15 tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 97,95%. Sehingga untuk meningkatkan capaian kinerja agar sesuai dengan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan selaku pembina teknis akan meningkatkan koordinasi dan melakukan inventarisir pada terminal yang telah selesai dilakukan revitalisasi maupun penambahan fasilitas yang digunakan sebagai indikator penilaian kinerja dalam Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A.

- **Kronologi Target**

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A pada Tahun 2022 memiliki target 74,15 yang diperoleh dari Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan asumsi proyeksi pimpinan pada rapat Rencana Strategis 2020-2024.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan dalam mencapai target pada Indikator Kinerja Kegiatan ini meliputi :

1. Menerapkan Terminal Online System (TOS) pada seluruh Terminal Tipe A;
2. Melakukan peningkatan SDM melalui training dan Bimtek terkait Terminal Online System (TOS);
3. Menambah biaya operasional pada satuan pelayanan untuk mendukung terlaksananya smart terminal sehingga persentase penerapan smart terminal dapat meningkat;

- **Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

Faktor yang dapat menghambat dalam mencapai target pada Indikator Kinerja Kegiatan ini meliputi:

1. Adanya backlog kegiatan, yang semula terencana dalam Renstra tetapi menjadi tidak terlaksana;
2. Belum meratanya penerapan smart terminal pada Terminal Tipe A;
3. Masih kurangnya jumlah SDM yang mampu melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana terkait Smart Terminal maupun Terminal Online System (TOS).

- **Narasi dan perhitungan Realisasi Kinerja :**

Berikut adalah perhitungan realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A pada Triwulan II tahun 2022 :

$$\% \text{Penerapan Smart Terminal} = \left[ \frac{\text{Jumlah TTA Yang Melaporkan Operasional Secara Online}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 74\% \right] + \left[ \frac{\text{Jumlah terminal dipasang mesin check in ticket dan passenger gate}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 8,4\% \right]$$



$$\begin{aligned} &+ \\ &\left[ \frac{\text{Jumlah terminal dipasang vehicle gate, digital information, cctv}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 17,6\% \right] \\ &= \left[ \frac{99}{103} \times 74\% \right] + \left[ \frac{8}{103} \times 8,4\% \right] + \left[ \frac{5}{103} \times 17,6\% \right] \\ &= 72,63\% \end{aligned}$$

**Keterangan:**

Penerapan Smart Terminal dibagi menjadi 3 bagian, antara lain :

1. Persentase dari Jumlah Terminal Tipe A Yang Melaporkan Operasional Secara Online dengan bobot 74%
  2. Persentase dari Jumlah terminal dipasang mesin check in ticket dan passenger gate dengan bobot 8,4%
  3. Persentasae dari Jumlah terminal dipasang vehicle gate, digital information dan CCTV dengan bobot 17,6%
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja  
Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A pada Triwulan II tahun 2022 terhadap target PK Tahun 2022 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{72,63}{74,15} \times 100\% = 97,95\%$$

- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Kegiatan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang dapat mendukung tercapainya kinerja kegiatan ini yaitu Bimtek Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan dan Terminal Online Sistem dengan total Pagu Anggaran sebesar RP. 250.000.000,- dan realisasi keuangan per Triwulan II sebesar Rp112.604.512,- (45.02%).

**a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melakukan mengoptimalisasikan pelaporan operasional Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat secara online dengan memasang perangkat digitalisasi terminal, yaitu melalui percepatan kegiatan Pemanfaatan Terminal Operating System.
2. Meningkatkan kegiatan pengawasan pada pengoperasian dan pengelolaan terminal terkait dengan implementasi Terminal Online System.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang



### II.2.3 SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

- Uraian Sasaran Kegiatan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

#### II.2.3.1 IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

##### a.1 Definisi Indikator Kinerja

Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat merupakan perbandingan jumlah angkutan barang yang melanggar di UPPKB terhadap jumlah angkutan barang yang masuk ke UPPKB.

Berdasarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, pasal 5 ayat (2) menyatakan jenis pelanggaran angkutan barang di UPPKB meliputi:

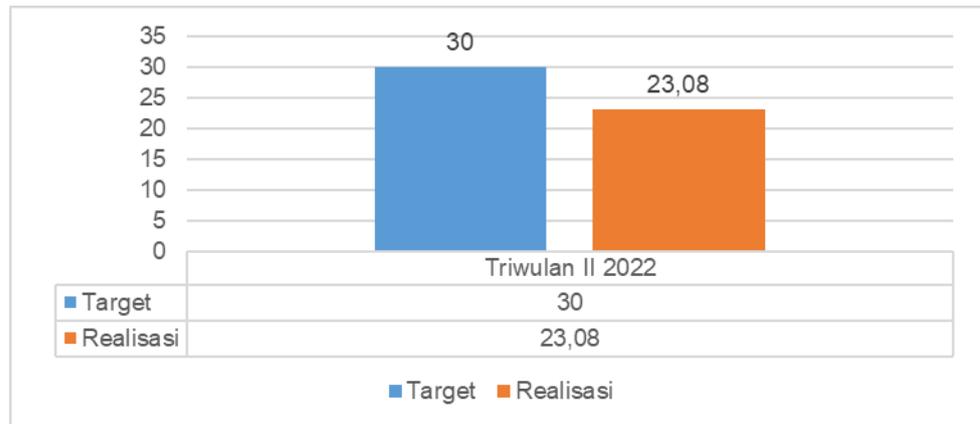
- a. tata cara pemuatan barang;
- b. dimensi kendaraan Angkutan Barang;
- c. tekanan seluruh sumbu dari/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;
- d. dokumen Angkutan Barang;
- e. kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan
- f. jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

Untuk menghitung IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah Kendaraan yang masuk UPPKB}} \times 100\%$$

##### a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Realisasi Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Triwulan II tahun 2022 sebesar 23,08%, jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2022 sebesar 30% maka capaian kinerja mencapai 123,07%. Berdasarkan capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi pada Triwulan II sudah sesuai target pada PK Tahun 2022. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.



### a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum  
Berdasarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, pasal 5 ayat (2) menyatakan jenis pelanggaran angkutan barang di UPPKB meliputi:
  - a. tata cara pemuatan barang;
  - b. dimensi kendaraan Angkutan Barang;
  - c. tekanan seluruh sumbu dari/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;
  - d. dokumen Angkutan Barang;
  - e. kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan
  - f. jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

Sedangkan dasar hukum yang digunakan sebagai dasar indikator penilaian kinerja UPPKB meliputi :

1. Perdirjen SK-736 Tahun 2017 (Penindakan ODOL)
  2. Perdirjen SK-4084 Tahun 2020 (Implementasi SOP UPPKB dan Sistem manajemen Mutu ISO 9001)
  3. Permenhub 25 Tahun 2018 (Self Assesment Penilaian Kinerja UPPKB)
  4. Permenhub 134 Tahun 2015 (Tipe/ KL S UPPKB untuk Penilaian Sarana Prasarana UPPKB)
  5. Permenhub 49 Tahun 2019 (Survey Kepuasan Pelanggan UPPKB)
  6. Perdirjen SK-736 Tahun 2017 (SDM dan Produktifitas UPPKB serta Standar Pelayanan Minimal UPPKB)
- Narasi Kronologi Target  
Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Tahun 2022 memiliki target 30 yang diperoleh dari Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan asumsi proyeksi pimpinan pada rapat Rencana Strategis 2020-2024.



- Narasi Faktor Keberhasilan

Berikut adalah beberapa factor keberhasilan yang dapat mendukung dalam pencapaian target pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat:

1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM)
2. Membuat outlook UPPKB
3. Membuat Pedoman Teknis WIM
4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB
5. Melakukan Pemeliharaan JTO
6. Melakukan Revisi Perdirjen SK.736
7. Pengadaan WIM di UPPKB Ajibarang dan Balonggandu
8. Melakukan pengawasan kepada Satpel UPPKB melalui adanya pelaporan data penimbangan secara periodik setiap bulan.

Selain faktor keberhasilan di atas, pada UPPKB juga telah dilaksanakan Sistem Manajemen Mutu yaitu Upaya yang sistematis melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan / pengendalian serta tindak lanjut terhadap semua unsur organisasi baik internal maupun eksternal terhadap Mutu Produk / Jasa dan Kepuasan Pelanggan. Sehingga dengan adanya Sistem Manajemen Mutu tersebut diharapkan mampu merubah paradigma berupa adanya perbaikan sarana – prasarana, Peningkatan Kompetensi SDM, dan adanya Sertifikasi ISO 9001:2015.

Dampak positif Balai Pengelola Transportasi Darat dan Satuan Pelayanan UPPKB menerapkan Sistem Manajemen Mutu 9001:2015 meliputi:

1. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Telah memiliki tools untuk menilai kinerja UPPKB
2. Manajemen Puncak (Kepala BPTD) dan Stakeholder (Ditjen Hubdat) dapat memberikan arahan dan target pengawasan sesuai dengan analisa data produktivitas yang didapatkan dari Penilaian Produktivitas menggunakan Pendekatan SMM (Komunikasi Top Down) terlaksana);
3. Terjaminya kesamaan prosedur pelaksanaan dan keluaran pekerjaan di UPPKB;
4. Sebagai basis dokumentasi awal dalam rangka penyiapan ZI, WBK & WBBM;
5. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan telah dilakukan sehingga Organisasi dapat melakukan pemantauan sesuai dengan persepsi pelanggan;
6. Dengan adanya SOP Rencana Kerja Operasional di UPPKB, proses penyusunan dokumen kebutuhan anggaran dapat mencakup kebutuhan di UPPKB (Komunikasi Bottom Up sudah terlaksana);
7. BPTD & UPPKB sudah mulai menerapkan Pengendalian risiko dengan penyusunan dokumen identifikasi risiko;
8. Pemastian pelaksanaan perbaikan secara terus menerus atas sistem kerja baik di BPTD maupun UPPKB menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Mutu;



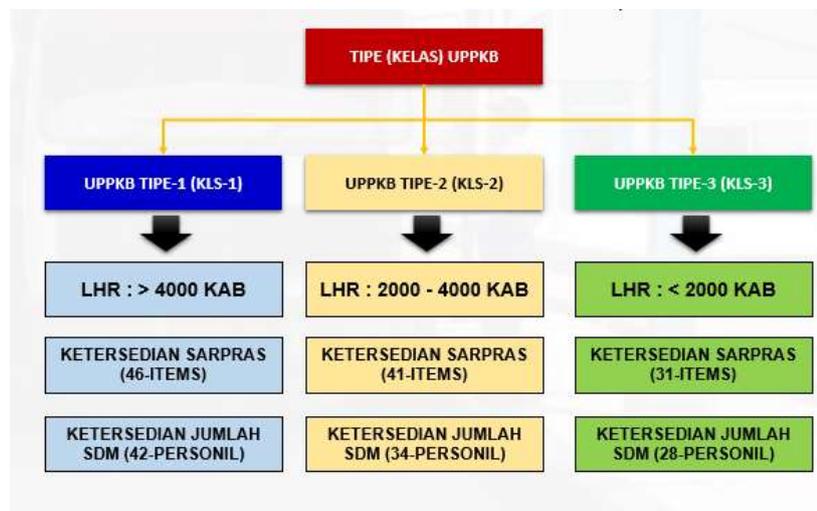
Berikut adalah hasil pekerjaan Sistem Manajemen Mutu 2020 :

1. Adanya usulan perubahan PM-134-2015 dan SK-Perdirjen, 736-2017;

Bagian Keempat  
Tipe UPPKB  
Pasal 10

- (1) Penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf a dikelompokkan menjadi 2 (dua) tipe.
- (2) Tipe penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. tipe I yaitu untuk ruas jalan yang jumlah kendaraan barang per arah per hari lebih kecil dari 2000 (dua ribu) dan dilengkapi dengan 1 (satu) platform penimbangan; dan
  - b. tipe II yaitu untuk ruas jalan yang jumlah kendaraan barang per arah per hari sama dengan dari 2000 (dua ribu) atau lebih dan dilengkapi dengan 2 (dua) atau lebih platform penimbangan.

Sebelum Perubahan



Usulan Perubahan

2. Adanya Teknologi SI diantaranya dapat dilakukan rasionalisasi SDM UPPKB, dapat mengurangi beban kerja, dan adanya efisiensi operasional UPPKB (% : Pengawasan, Penindakan dan Pencatatan);

Sedangkan untuk Target kerjasama Sistem Manajemen Mutu di UPPKB ini yaitu :

1. Peningkatan Kinerja BPTD dan UPPKB;
2. Perubahan Mindset UPPKB;
3. SDM Profesional UPPKB;
4. Penggunaan Teknologi Sistem INF;
5. Pendataan yang baik;
6. Tidak ada pungutan liar;
7. Sertifikasi ISO 9001:2015 pada UPPKB;
8. Bebas ODOL 2023



Hasil Pelaksanaan Pendampingan yang telah dilakukan Penilaian Oleh Tenaga Ahli Konsultan Manajemen untuk dapat dilaksanakan Sertifikasi di UPPKB. Persyaratan Sertifikasi tersebut diawali dengan adanya sosialisasi (awareness) ISO 9001 dengan Implementasi selama 3 bulan menerapkan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait UPPKB, kemudian dilakukan audit internal oleh BPTD dan Satpel UPPKB melalui Rapat Tinjauan Manajemen dimana Platform UPPKB telah di kalibrasi. Kemudian untuk penilaian kesesuaian badan sertifikasi dilakukan oleh Audit Eksternal yaitu *TUV Rheinland Certified*. Berikut adalah daftar UPPKB yang telah tersertifikasi ISO 9001:2015:

BPTD	UPPKB
Wilayah II Sumatra Utara	1. Dolok Estate Limapuluh 2. Mambang Muda
Wilayah III Sumatra Barat	3. Lubuk Selasih 4. Sungai Langsung 5. Air Haji
Wilayah IV Riau dan Kepri	6. Muara Lembu
Wilayah V Jambi	7. Jambi Merlung 8. Pelawan – Sarolangon 9. Muara Tembesi
Wilayah IX Jawa Barat	10. Balonggandu 11. Losarang*
Wilayah X Jawa Tengah	12. Kulwaru 13. Tanjung 14. Kalitirto
Wilayah XI Jawa Timur	15. Rejoso 16. Trosobo
Wilayah XIII NTT	17. Nun Baun Sabu
Wilayah XIV Kalimantan Barat	18. Siantan
Wilayah XVIII Sulawesi Utara	19. Sabilambo
Wilayah XIX Sulawesi Selatan & Barat	20. Pallangga 21. Somba Opu 22. Maccopa 23. Pakku
Wilayah XXI Gorontalo	24. Molotabu
BPTD Wilayah - VI Bengkulu & Lampung	25. Way Urang
BPTD Wilayah - VIII Banten	26. Cikande
BPTD Wilayah - XI Jawa Timur	27. Singosari
BPTD Wilayah - XXII Sulawesi Utara	28. Bitung
BPTD Wilayah - XXIII Maluku	29. Passo



- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan  
Berikut ini adalah faktor yang menjadi penyebab kegagalan tercapainya IKK Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat:
  1. Kurangnya SDM pada UPPKB baik secara kuantitas maupun kualitas;
  2. Adanya jaminan keselamatan petugas UPPKB;
  3. Masih terdapat beberapa UPPKB yang letaknya sulit untuk dijangkau oleh jaringan internet.

- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja  
Berdasarkan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Triwulan II tahun 2022 diperoleh 23,08%, sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 telah melebihi target renstra dan target PK Tahun 2022.

Sehingga:

$$IKK = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah Kendaraan yang masuk UPPKB}} \times 100\% \\ = \frac{39276}{170139} \times 100\% = 23,08\%$$

\*semakin rendah persentase pelanggaran, semakin baik, semakin tinggi persentase pelanggaran, semakin buruk

- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja  
Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Triwulan II tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{30 - (23,08 - 30)}{30} \times 100\% = 123,07\%$$

- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan  
Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini meliputi :
  1. Pengawasan kendaraan angkutan barang di UPPKB dengan menggunakan aplikasi JTO (dilaksanakan oleh BPTD);
  2. Pengadaan weigh-in-motion (WIM) di UPPKB Ajibarang dan UPPKB Balonggandu;
  3. Pelaksanaan sistem manajemen mutu UPPKB (ISO 9001:2015);
  4. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor.
  5. Kerjasama Pengelolaan UPPKB dengan Pihak Kedua



Berdasarkan perbandingan antara target anggaran yang mendukung IKK Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp. 32.047.245.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.105.558.685,-, diperoleh capaian realisasi keuangan sebesar 9,94%.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang  
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu
1. Mewujudkan Indonesia bebas ODOL Tahun 2023 dengan cara melakukan pemasangan fasilitas pendukung sistem jembatan timbang online, pengembangan integrasi JTO dengan sistem weight in motion dan sistem ETLE milik Kepolisian.
  2. Meningkatkan kegiatan pengawasan pada pengoperasian dan pengelolaan UPPKB terkait dengan pelanggaran ODOL.
  3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang;

#### **II.2.4 SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat**

- Uraian Sasaran Kegiatan  
Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat;

##### **II.2.4.1 IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat**

###### a.1. Definisi Indikator Kinerja

Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat merupakan hasil kualitas Dukungan Teknis Transportasi Darat dengan menggunakan uraian bobot menyesuaikan dengan target Ditjen Perhubungan Darat. Salah satu bobot yang memengaruhi yaitu tingkat penyerapan Anggaran Satuan Kerja dengan menyesuaikan realisasi anggaran pada Triwulan II Tahun 2022 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- a) Aspek Perencanaan;
- b) Aspek Kepegawaian (SDM);
- c) Aspek Keuangan;
- d) Aspek Hukum dan Kerjasama.

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Berikut adalah tabel perhitungan nilai bobot pada IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat:

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
<b>A</b>	<b>Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan</b>	<b>35%</b>	
<b>I</b>	<b>SAKIP</b>	20%	
a	Rencana Strategis (Renstra)	4	
	Nilai 4 (empat) apabila selesai $\leq 60$ hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 61-90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai $>90$ hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
b	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2	
	Nilai 2 (dua) apabila selesai $>30$ hari sebelum Awal Tahun Anggaran (maksimal 1 Desember)		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 1-30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (2-31 Desember)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai $\geq 1$ hari setelah Awal Tahun Anggaran ( $\geq 1$ Januari)		
c	Perjanjian Kinerja (PK)	3	
	Nilai 3 (tiga) apabila selesai $\leq 20$ hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai $>50$ hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
d	Rencana Aksi (Renaksi)	2	
	Nilai 2 (dua) apabila selesai $\leq 20$ hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai $>50$ hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
e	Input Aplikasi e-Performance	2	
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II, III	2	
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	4	
	Nilai 4 (empat) apabila selesai $\leq 25$ hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 2 (dua) selesai 25-55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 1 (satu) selesai $>55$ hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
<b>2</b>	<b>Input Aplikasi e-Planning</b>	15%	
a	Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan	5	



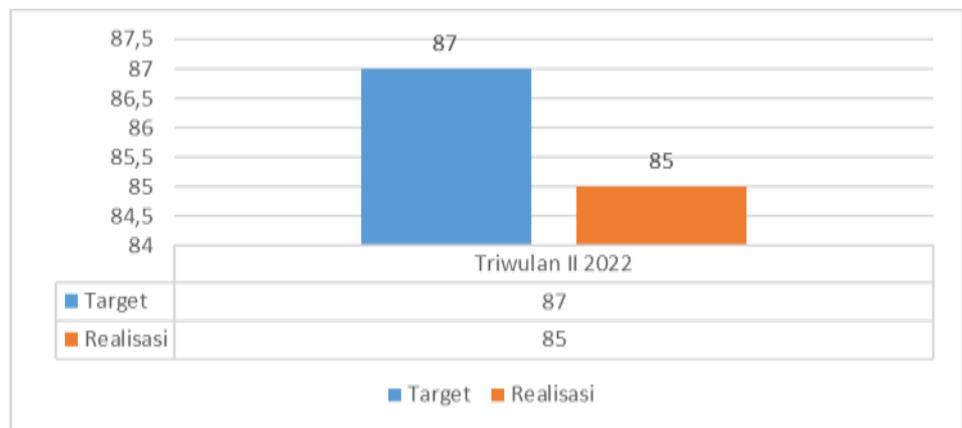
NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
	b	Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif	5
	c	Input Aplikasi e-Planning Pagu Definitif	5
<b>B</b>	<b>Indeks Profesionalisme ASN</b>	<b>35%</b>	
	1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	8,5
	2	Kompetensi	14
	3	Kinerja	11
	4	Disiplin	1,5
<b>C</b>	<b>Tingkat Pengelolaan Keuangan</b>	<b>30%</b>	
	1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10
		Nilai 10 (sepuluh) apabila status excellent atau capaian daya serap $\geq 100\%$	
		Nilai 8 (delapan) apabila status on-track atau capaian daya serap 80,1% sampai dengan 99,99%	
		Nilai 6 (enam) apabila status warning atau capaian daya serap 60,1% sampai dengan 80%	
		Nilai 5 (lima) apabila status alert atau capaian daya serap di bawah 60%	
	2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 80,1% sampai dengan 100%	
		Nilai 8 (delapan) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 60,1% sampai dengan 80%	
		Nilai 6 (enam) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 40,1% sampai dengan 60%	
		Nilai 4 (empat) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 20,1% sampai dengan 40%	
		Nilai 2 (dua) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) di bawah 20%	
	3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	10
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 80,1% sampai dengan 100%	
		Nilai 8 (delapan) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 60,1% sampai dengan 80%	
		Nilai 6 (enam) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 40,1% sampai dengan 60%	
		Nilai 4 (empat) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 20,1% sampai dengan 40%	
		Nilai 2 (dua) apabila Persentase TL Tuntas di bawah 20%	

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



### a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Realisasi Kinerja IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada Triwulan II tahun 2022 sebesar 85 jika dibandingkan dengan target PK tahun 2022 sebesar 87 maka capaian kinerja mencapai 97,7%. Berdasarkan capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi pada Triwulan II masih belum sesuai target pada PK Tahun 2022. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.



### a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar HukumKronologi Target  
Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:
  - a) Aspek Perencanaan;  
Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.
  - b) Aspek Kepegawaian (SDM);  
Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.
  - c) Aspek Keuangan;  
Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja.
- Narasi Kronologi Target  
Target pada IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat menggunakan dan mengacu target yang digunakan oleh Ditjen Perhubungan Darat pada Renstra Ditjen Perhubungan Darat 2020-2024.



- Narasi Faktor Keberhasilan  
Berikut adalah beberapa hal yang menjadi faktor keberhasilan dalam mencapai target:
  1. Dokumen perencanaan telah diselesaikan secara tepat waktu;
  2. Daya serap anggaran satuan kerja pada Triwulan II Tahun 2022 sudah mencapai 37,94%;
  3. Pengelolaan Barang Milik Negara untuk Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara sudah mencapai 30%;
  4. Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK) tahun 2021 sudah tuntas 100%.
  
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan  
Faktor yang dapat menimbulkan potensi kegagalan dalam mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis, meliputi:
  1. Pelaksanaan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang tidak tepat waktu;
  2. Daya serap anggaran satuan kerja yang tidak sesuai target;
  3. Pengelolaan dalam melakukan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara masih kurang maksimal;
  4. Masih terdapat Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK) yang belum tuntas.
  
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja  
Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pada Perjanjian Kinerja Triwulan II tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 diperoleh dengan nilai sebagai berikut:

**Tabel II. 10** Keberhasilan Capaian Indikator Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
<b>A</b>	<b>Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan</b>	<b>35%</b>	
	<b>I SAKIP</b>	20%	
	a Rencana Strategis (Renstra)	4	4
	Nilai 4 (empat) apabila selesai $\leq 60$ hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 61-90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai $>90$ hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	b Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selesai $>30$ hari sebelum Awal Tahun Anggaran (maksimal 1 Desember)		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 1-30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (2-31 Desember)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai $\geq 1$ hari setelah Awal Tahun Anggaran ( $\geq 1$ Januari)		
	c Perjanjian Kinerja (PK)	3	3
	Nilai 3 (tiga) apabila selesai $\leq 20$ hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		



NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
d	Rencana Aksi (Renaksi)	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
e	Input Aplikasi e-Performance	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II, II, III	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	4	4
	Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤25 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 2 (dua) selesai 25-55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 1 (satu) selesai >55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
<b>2</b>	<b>Input Aplikasi e-Planning</b>	<b>15%</b>	
a	Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan	5	4
b	Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif	5	4
c	Input Aplikasi e-Planning Pagu Definitif	5	4
<b>B</b>	<b>Indeks Profesionalisme ASN</b>	<b>35%</b>	
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	8,5	8,5
2	Kompetensi	14	14
3	Kinerja	11	11
4	Disiplin	1,5	1,5
<b>C</b>	<b>Tingkat Pengelolaan Keuangan</b>	<b>30%</b>	
1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10	5
	Nilai 10 (sepuluh) apabila status excellent atau capaian daya serap ≥100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila status on-track atau capaian daya serap 80,1% sampai dengan 99,99%		
	Nilai 6 (enam) apabila status warning atau capaian daya serap 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 5 (lima) apabila status alert atau capaian daya serap di bawah 60%		
2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10	4
	Nilai 10 (sepuluh) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 80,1% sampai dengan 100%		



NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
	Nilai 8 (delapan) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 6 (enam) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
	Nilai 4 (empat) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
	Nilai 2 (dua) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) di bawah 20%		
3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	10	10
	Nilai 10 (sepuluh) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 6 (enam) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
	Nilai 4 (empat) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
	Nilai 2 (dua) apabila Persentase TL Tuntas di bawah 20%		
			85

$$\% \text{ Capaian} = \frac{85}{87} \times 100\% = 97,7\%$$

Kegiatan yang termasuk dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis meliputi:

1. Fasilitas Rest Area pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2022 dan Nataru;
2. Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana
3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor
4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor
5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor
6. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor
7. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor
8. Pendampingan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu UPPKB
9. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
10. Inhouse Consultant Penyusunan Bahan Pimpinan
11. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan
12. Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Angkutan Jalan
13. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan



14. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
15. Sosialisasi Peraturan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
16. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
17. Survey dan Monitoring Fasilitas Rest Area pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2023
18. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan
19. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta
20. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi KPBU Prasarana Transportasi Jalan
21. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan
22. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri
23. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi
24. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022
25. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan
26. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait
27. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor
28. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan

Berdasarkan perbandingan antara target anggaran yang mendukung IKK peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar Rp. 26.614.974.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.344.819.333,-, diperoleh capaian realisasi keuangan sebesar 27,60%.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang  
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :
  1. Melakukan peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan dukungan teknis agar dapat mendukung tercapainya indikator kinerja kegiatan sesuai dengan target perjanjian kinerja dan rencana strategis serta dapat mendukung tercapainya program kegiatan sesuai dengan DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2022.
  2. Meningkatkan kegiatan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan target waktu yang ditentukan.
  3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang;



## **II.2.5 SK1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum**

- Uraian Sasaran Kegiatan  
Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;

### **II.2.5.1 IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan**

#### a.1 Definisi Indikator Kinerja

1. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Umum, sebagaimana dijelaskan yaitu dalam melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan urusan keprotokolan, ketatausahaan, arsip, kerumatanggaan, serta penyiapan perencanaan dan keuangan Sekretariat Jenderal.
2. Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang bertempat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.
3. Pelaksanaan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada stakeholders (Pimpinan dan pegawai) di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai implikasi dari tugas dan fungsi yang diampu Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Sumber Data pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui hasil kuesioner sebagai berikut:

1. Hasil kuesioner Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Terhadap Kinerja Layanan Perkantoran yang ditujukan kepada setiap Pegawai yang bertempat di Kantor Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.
2. Hasil kuesioner assessment (penilaian sendiri) yang ditujukan kepada internal sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil kuesioner Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Cara Menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui perhitungan sebagai berikut :



1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
2. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.
3. Bobot:
  - Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV (25%);
  - Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
  - Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

**Tabel II.12** Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
<b>A</b>	<b>Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV</b>	<b>25%</b>	
1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon II	10	
2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	8	
3	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	7	
<b>B</b>	<b>Tingkat Kepuasan Staf</b>	<b>25%</b>	
<b>C</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran</b>	<b>50%</b>	
1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	

Cara Perhitungan:

- A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III, dan IV diukur melalui kuesioner terlampir

FORM A1

**KUESIONER TINGKAT KEPUASAN  
PENYELENGGARAAN PERKANTORAN**

SATUAN KERJA .....

NAMA : \_\_\_\_\_

JABATAN : \_\_\_\_\_

NIK : \_\_\_\_\_

**A. PERKANTORAN**

1. Berikut merupakan persepsi atau tingkat pelayanan/ layanan Perkantoran, dengan indikator 1 (Tidak Nyaman/Baik), 2 (Kurang Nyaman/Baik), 3 (Cukup), 4 (Nyaman/Baik), 5 (Sangat Nyaman/Baik) adalah sebagai berikut:

NO	ASPEK PENILAIAN/URAIAN	PERSEPSI				
		1	2	3	4	5
1	Kondisi Ruang Kerja					
2	Kebersihan Ruang Kerja					
3						
4						
5						
6						

Ket: diisi dengan tanda centang (✓) pada pilihan persepsi



B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuisioner berikut :

FORM A1

**KUESIONER TINGKAT KEPUASAN  
PENYELENGGARAAN PERKANTORAN**

SATUAN KERJA .....

NAMA : \_\_\_\_\_

JABATAN : \_\_\_\_\_

NIC : \_\_\_\_\_

**A. PERKANTORAN**

1. Berikut merupakan persepsi atas tingkat pelayanan (layanan) Perkantoran, dengan indikator: 1 (Tidak Nyaman/Baik), 2 (Kurang Nyaman/Baik), 3 (Cukup), 4 (Nyaman/Baik), 5 (Sangat Nyaman/Baik) adalah sebagai berikut:

NO	ASPEK PENILAIAN/URAIAN	PERSEPSI				
		1	2	3	4	5
1	Kondisi Ruang Kerja					
2	Kebersihan Ruang Kerja					
3						
4						
5						
6						

Ket. diisi dengan tanda centung (✓) pada pilihan persepsi

C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

$$x = \frac{95}{86} \times 100\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}^*} \times 100\%$$

$$x = \frac{40}{86} \times 100\%$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata - rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

$$x = \frac{2,31}{5} \times 100\%$$

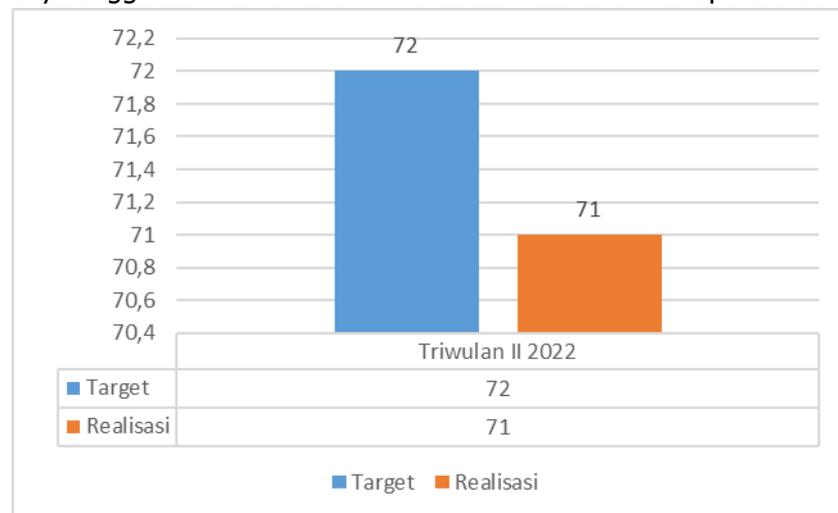


Note:

- \*) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai – Pegawai Perbantuan Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security
- \*\*\*) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (download) yang diukur pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurangnya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor
- \*\*\*) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Realisasi kinerja IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada Triwulan II tahun 2022 sebesar 71, jika dibandingkan dengan target PK tahun 2022 sebesar 72 maka capaian kinerja mencapai 98,61%. Berdasarkan capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi pada Triwulan II Tahun 2022 terhadap target PK Tahun 2022 masih belum memenuhi target. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.



a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum  
Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan memperhitungkan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran sesuai dengan target pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Kegiatan yang termasuk dalam Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, yaitu kegiatan layanan perkantoran dan pengadaan belanja modal lainnya.



- Narasi Kronologi target  
Target pada IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan menggunakan dan mengacu target yang digunakan oleh Ditjen Perhubungan Darat pada Renstra Ditjen Perhubungan Darat 2020-2024.
- Narasi Faktor Keberhasilan  
Beberapa faktor keberhasilan dalam mencapai target adalah sebagai berikut:
  9. Melakukan survey tingkat kepuasan baik kepada pejabat, maupun staf terkait layanan perkantoran;
  10. Meningkatkan ketersediaan pc/laptop dengan menyesuaikan jumlah pegawai;
  11. Meningkatkan kecepatan internet (unduh) di kantor.
  12. Meningkatkan kesadaran antar pegawai untuk merawat fasilitas yang telah diberikan.
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan  
Dalam mencapai target tersebut ada beberapa yang dapat menjadi potensi kegagalan, yaitu :
  1. Ketersediaan PC/laptop masih belum sesuai dengan jumlah pegawai;
  2. Kecepatan fasilitas unduh internet masih dibawah standar kecepatan internet;
  3. Diperlukan kesadaran pegawai untuk merawat fasilitas yang telah diberikan oleh unit kerja.
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja  
Berikut adalah hasil perhitungan realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran:

**Tabel II.13** Hasil Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran

NO	URAIAN	BOBOT	HASIL PERHITUNGAN	NILAI
<b>A</b>	<b>Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV</b>	<b>25%</b>		
1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon II	10%	70,0	7,00
2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	8%	70,0	5,60
3	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	7%	70,0	4,90
<b>B</b>	<b>Tingkat Kepuasan Staf</b>	<b>25%</b>	<b>70,0</b>	<b>17,50</b>
<b>C</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran</b>	<b>50%</b>		
1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20%	110,47	22,09
2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15%	46,51	6,98
3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15%	46,2	6,93
<b>TOTAL NILAI</b>				<b>71,00</b>

- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja  
Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Triwulan II tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar:



$$\% \text{ Capaian} = \frac{71}{72} \times 100\% = 100\%$$

- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Berdasarkan perbandingan antara target anggaran yang mendukung IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar Rp.6.218.804.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.035.180.629,-, diperoleh capaian realisasi keuangan sebesar 32,73%.

a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu

- Melakukan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan layanan perkantoran;
- Melakukan optimalisasi penyerapan anggaran sesuai dengan target rencana penarikan dana yang ada.
- Meningkatkan pengawasan pada kegiatan layanan perkantoran.
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

## II.3 Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2022

### II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2022

#### II.3.1.1 Pagu Anggaran

- Pagu Awal DIPA TA. 2022 sebesar **Rp 87.452.162.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 15 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2022

<b>RM</b>	Rp.	78.052.162.000	89,25%
<b>PNBP</b>	Rp.	9.400.000.000	10,75%
<b>SBSN</b>	Rp.	-	0,00%
<b>Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>87.452.162.000</b>	<b>100%</b>

Tabel II. 16 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2022

<b>Belanja Pegawai</b>	Rp.	-	0,00%
<b>Belanja Barang</b>	Rp.	41.637.262.000	47,61%
<b>Belanja Modal</b>	Rp.	45.814.900.000	52,39%
<b>Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>87.452.162.000</b>	<b>100%</b>

#### a.1 Rincian Per Sumber Dana Tahun 2022

Terdapat perubahan pagu pada DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan TA. 2022 akibat adanya Revisi DIPA/POK di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar



**Rp.2.008.398.000,-** Sehingga Total Pagu akhir DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada Triwulan II TA. 2022 adalah sebesar **Rp. 85.443.764.000,-** dengan rincian berdasarkan Sumber Dana Pagu per Triwulan II TA. 2022.

Tabel II. 17 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan II TA. 2022

<b>RM</b>	Rp.	76.043.764.000	89,00%
<b>PNBP</b>	Rp.	9.400.000.000	11,00%
<b>SBSN</b>	Rp.	0	0,00%
<b>Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>85.443.764.000</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Data diolah Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

### a.2. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2022

Terdapat perubahan pagu pada DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan TA. 2022 akibat adanya Revisi DIPA/ POK di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sebesar **Rp.2.008.398.000,-** Sehingga Total Pagu akhir DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada Triwulan II TA. 2022 adalah sebesar **Rp.85.443.764.000,-** dengan rincian berdasarkan Jenis Belanja Pagu per Triwulan II TA. 2022:

Tabel II. 18 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan II TA. 2022

<b>Belanja Pegawai</b>	Rp.	0	0,00%
<b>Belanja Barang</b>	Rp.	49.151.264.000	57.52%
<b>Belanja Modal</b>	Rp.	36.292.500.000	42.48%
<b>Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>85.443.764.000</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Data diolah Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

### a.3. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Terdapat perubahan pagu pada DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan TA. 2022 akibat adanya Revisi DIPA di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar **Rp.2.008.398.000,-** Sehingga Total Pagu akhir DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada Triwulan II TA. 2022 adalah sebesar **Rp. 85.443.764.000,-**. Berikut adalah rincian revisi per sumber dana dan per jenis belanja.

#### II.3.1.2. Refocusing Anggaran Tahun 2022

Terdapat Realokasi Anggaran sesuai arahan Kementerian Perhubungan yaitu Realokasi tahap I Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KU.002/1/20/DJPD/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Perbaikan Usulan Revisi Anggaran TA. 2022 dari pagu sebesar Rp.87.452.162.000,- pada revisi ke-1 menjadi sebesar Rp.85.443.764.000,- pada revisi ke-2;

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melakukan revisi anggaran sebanyak 2 (dua) kali pada Triwulan II Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan anggaran yang berupa pengusulan perubahan akun belanja.



Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KU.002/1/3/DJPD/2022 tanggal 13 Januari 2022 Hal Tindak Lanjut Atas Revisi Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) TA. 2022 dan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KU.002/3/3/DJPD/2022 tanggal 16 Juni 2022 Hal Penyampaian Pengesahan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat TA 2022 (Revisi ke-5), bersama ini disampaikan bahwa terdapat *Automatic Adjustment* I dan II dengan total sebesar Rp. 8.982.232.000,- sampai dengan triwulan II tahun 2022 yang masih dalam posisi *freeze*, sehingga dapat mempengaruhi prognosa akhir realisasi anggaran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

### a.1. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2022

Tabel II. 19 Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A. 2022

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	78.052.162.000	9.400.000.000	-	87.452.162.000
REVISI KE-1	78.052.162.000	9.400.000.000	-	87.452.162.000
REVISI KE-2	76.043.764.000	9.400.000.000	-	85.443.764.000
REVISI KE-3	76.043.764.000	9.400.000.000	-	85.443.764.000
REVISI KE-4	76.043.764.000	9.400.000.000	-	85.443.764.000

Sumber: Data diolah Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

### a.2. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2022

Tabel II. 20 Rincian Revisi per Jenis Belanja T.A. 2022

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	-	41.637.262.000	45.814.900.000	87.452.162.000
REVISI KE-1	-	41.637.262.000	45.814.900.000	87.452.162.000
REVISI KE-2	-	39.628.864.000	45.814.900.000	85.443.764.000
REVISI KE-3	-	49.151.264.000	36.292.500.000	85.443.764.000
REVISI KE-4	-	49.151.264.000	36.292.500.000	85.443.764.000

Sumber: Data diolah Direktorat Prasarana Transportasi Jalan



### a.3. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2022

Tabel II. 21 Rincian Revisi Anggaran Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A. 2022

JENIS	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR	PERUBAHAN	PAGU AKHIR
			PER TRIWULAN II		PER TRIWULAN II
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-
Belanja Barang	41.637.262.000	2.008.398.000	39.628.864.000	- 9.522.400.000	49.151.264.000
Belanja Modal	45.814.900.000	-	45.814.900.000	9.522.400.000	36.292.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>87.452.162.000</b>	<b>2.008.398.000</b>	<b>85.443.764.000</b>	<b>0</b>	<b>85.443.764.000</b>

### a.4. Rincian Revisi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

Tabel II. 22 Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2022

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I	
				REALIASI	%
<b>022.03.GA</b>	<b>Program Infrastruktur Konektivitas</b>	<b>60.233.358.000</b>	<b>58.224.960.000</b>	<b>8.420.209.577</b>	<b>14,46%</b>
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	21.300.000.000	20.550.000.000	6.935.579.309	33,75%
GA.4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	9.400.000.000	9.400.000.000	-	0,00%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	29.533.358.000	28.274.960.000	1.484.630.268	5,25%
<b>022.03.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>27.218.804.000</b>	<b>27.218.804.000</b>	<b>4.015.811.543</b>	<b>14,75%</b>
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	27.218.804.000	27.218.804.000	4.015.811.543	14,75%
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>87.452.162.000</b>	<b>85.443.764.000</b>	<b>12.436.021.120</b>	<b>14,55%</b>

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II	
				REALIASI	%
<b>022.03.GA</b>	<b>Program Infrastruktur Konektivitas</b>	<b>60.233.358.000</b>	<b>58.224.960.000</b>	<b>27.385.558.858</b>	<b>47.03%</b>
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	21.300.000.000	20.550.000.000	19.841.489.149	96.55%
GA.4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	9.400.000.000	9.400.000.000	-	0,00%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	29.533.358.000	28.274.960.000	7.544.069.709	26.68%



KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II	
				REALIASI	%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	27.218.804.000	27.218.804.000	5.027.676.129	18.47%
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	27.218.804.000	27.218.804.000	5.027.676.129	18.47%
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>87.452.162.000</b>	<b>85.443.764.000</b>	<b>32.413.234.987</b>	<b>37.94%</b>

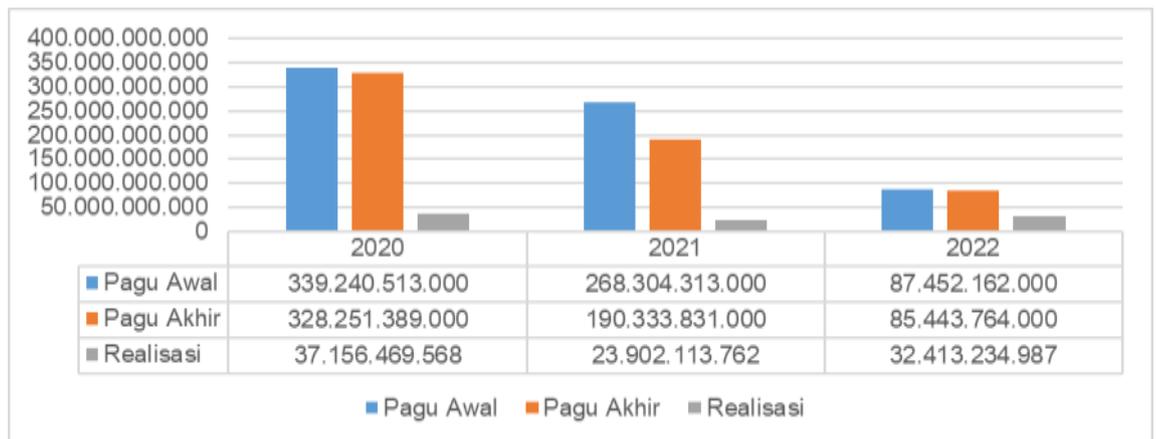
Sumber: Data diolah Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

### II.3.2.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 – 2022

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi anggaran Triwulan II dari tahun 2020 – 2022 pada untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 23 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2020 – Tahun 2022

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2020	339.240.513.000	328.251.389.000	37.156.469.568	11.32%
2	2021	268.304.313.000	190.333.831.000	23.902.113.762	12.56%
3	2022	87.452.162.000	85.443.764.000	32.413.234.987	37.94%



Gambar II 11 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2019 – Tahun 2022

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap per Triwulan II. Pada tahun 2020 terdapat peningkatan dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 37.156.469.568,- atau mencapai 11.32% dari pagu akhir Rp.328.251.389.000,-. Kemudian pada tahun 2021 terdapat peningkatan kembali dengan anggaran yang terserap sebesar Rp.23.902.113.762,- atau mencapai 12.56% dari pagu akhir Rp.190.333.831.000,-. Tahun 2022 terdapat peningkatan kembali dengan anggaran yang terserap sebesar Rp.32.413.234.987,- atau mencapai 37.94% dari pagu akhir Rp.85.443.764.000,-



## II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2022

### II.3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel II. 24 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I	
				REALISASI	%
<b>022.03.GA</b>	<b>Program Infrastruktur Konektivitas</b>	<b>60.233.358.000</b>	<b>58.224.960.000</b>	<b>8.420.209.577</b>	<b>14,46%</b>
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	21.300.000.000	20.550.000.000	6.935.579.309	33,75%
GA.4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	9.400.000.000	9.400.000.000	0	0,00%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	29.533.358.000	28.274.960.000	1.484.630.268	5,25%
<b>022.03.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>27.218.804.000</b>	<b>27.218.804.000</b>	<b>4.015.811.543</b>	<b>14,75%</b>
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	27.218.804.000	27.218.804.000	4.015.811.543	14,75%
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>87.452.162.000</b>	<b>85.443.764.000</b>	<b>12.436.021.120</b>	<b>14,55%</b>

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II	
				REALISASI	%
<b>022.03.GA</b>	<b>Program Infrastruktur Konektivitas</b>	<b>60.233.358.000</b>	<b>58.224.960.000</b>	<b>27.385.558.858</b>	<b>47.03%</b>
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	21.300.000.000	20.550.000.000	19.841.489.149	96.55%
GA.4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	9.400.000.000	9.400.000.000	-	0,00%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	29.533.358.000	28.274.960.000	7.544.069.709	26.68%
<b>022.03.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>27.218.804.000</b>	<b>27.218.804.000</b>	<b>5.027.676.129</b>	<b>18.47%</b>
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	27.218.804.000	27.218.804.000	5.027.676.129	18.47%
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>87.452.162.000</b>	<b>85.443.764.000</b>	<b>32.413.234.987</b>	<b>37.94%</b>

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan II Tahun 2021 adalah sebesar **Rp.32.413.234.987,-** atau mencapai **37.94%** dari total pagu sebesar **Rp.85.443.764.000,-**.



### II.3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2022 yang sudah di analisis per Triwulan II, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 25 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan II 2022

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I	
		Rp.	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang	39.628.864.000	5.500.441.811	13,88%
3	Belanja Modal	45.814.900.000	6.935.579.309	15,14%
<b>TOTAL</b>		<b>85.443.764.000</b>	<b>12.436.021.120</b>	<b>14,55%</b>

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW II	
		Rp.	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang	49151264000	11.767.610.118	23.94%
3	Belanja Modal	36292500000	20.645.624.869	56.89%
<b>TOTAL</b>		<b>85.443.764.000</b>	<b>32.413.234.987</b>	<b>37.94%</b>

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2022 dari Triwulan II adalah sebesar **Rp. 32.413.234.987,-** atau mencapai **37.94%** dari pagu akhir per Triwulan II sebesar **Rp.85.443.764.000,-**



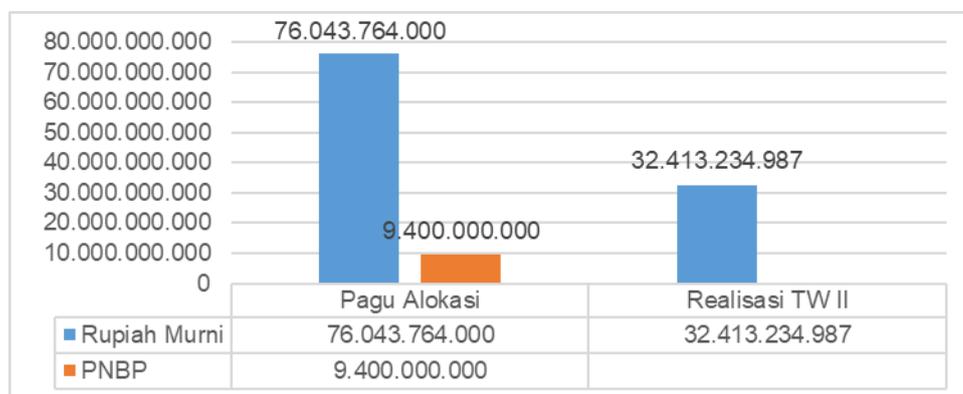
### II.3.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2022

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2022 yang sudah di analisis per Triwulan II, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 26 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan II Tahun 2022

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I	
		Rp.	Rp.	%
1	Rupiah Murni	76.043.764.000	12.436.021.120	16,35%
2	PNBP	9.400.000.000	-	0,00%
3	SBSN	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>85.443.764.000</b>	<b>12.436.021.120</b>	<b>14,55%</b>

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW II	
		Rp.	Rp.	%
1	Rupiah Murni	76.043.764.000	32.413.234.987	42,62%
2	PNBP	9.400.000.000	-	0,00%
3	SBSN	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>85.443.764.000</b>	<b>32.413.234.987</b>	<b>37,94%</b>



Gambar II 12 Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2022 dari Triwulan II adalah sebesar **Rp. 32.413.234.987,-** atau mencapai **37,94%** dari pagu akhir per Triwulan II sebesar **Rp.85.443.764.000,-**



### II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

#### II.3.3.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan berdasarkan sasaran Kegiatan per Triwulan II Tahun 2022, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 27 Efisiensi anggaran

No	Sasaran Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II		
		% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi Triwulan I)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi Triwulan II)
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi	88,86%	20,41%	68,45%	97,95%	24,85%	73,10%
2	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	99,31%	17,08%	82,23%	106,53%	94,59%	11,94%
3	SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	126,63%	9,69%	116,94%	123,07%	9,94%	113,13%
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	94,48%	7,20%	87,28%	97,70%	27,60%	66,88%
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	98,61%	18,36%	80,25%	98,61%	32,73%	65,88%
<b>Total</b>		<b>101,58%</b>	<b>14,55%</b>	<b>87,03%</b>	<b>104,77%</b>	<b>37,94%</b>	<b>66,83%</b>

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Triwulan II sebesar 104,77%, dengan realisasi anggaran sebesar 37,94% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 66,83%.



### II.3.3.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia berdasarkan sasaran Kegiatan per Triwulan II Tahun 2022, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.28 Efisiensi SDM

No	Sasaran Kegiatan	Triwulan II			% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	Efisiensi (posisi triwulan II)
		Jumlah Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	% Capaian SDM		
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi	25	22	88%	97,95%	10,46%
2	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	25	15	60%	106.53%	46.53%
3	SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	25	14	56%	123.07%	67.07%
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	30	28	93%	97.70%	4.37%
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	20	7	35%	98.61%	63.61%
<b>Total</b>		<b>125</b>	<b>86</b>	<b>66%</b>	<b>104,77%</b>	<b>38,31%</b>

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Triwulan II sebesar 104,77%, dengan Capaian Sumber Daya Manusia menunjukkan adanya efisiensi Sumber Daya Manusia sebesar 38,31%, dimana walaupun masih ada kekurangan Sumber Daya Manusia tetapi masih bisa mencapai target kinerja.



### II.3.3.3. Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2022:

1. Terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia sejak Maret 2020 di Indonesia, sehingga beberapa pekerjaan ditunda pengerjaannya karena adanya kebijakan PSBB/PPKM di berbagai lokasi, sehingga waktu penyelesaian mundur dari target yang telah ditetapkan.
2. Adanya revisi anggaran yang akan dialihkan untuk kegiatan *Buy The Service* pada Direktorat Angkutan Jalan.
3. Akibat adanya revisi anggaran menyebabkan banyak perubahan-perubahan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan rencana pada awal tahun.
4. Adanya *automatical adjustment* I dan II dengan total sebesar Rp. 8.982.232.000,- pada triwulan II yang masih dalam posisi *freeze*, sehingga dapat mempengaruhi prognosa akhir realisasi anggaran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.
5. Membutuhkan koordinasi yang lebih intens dan komprehensif dengan stakeholder terkait agar kegiatan monitoring atau evaluasi menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi kinerjanya maupun realisasi anggaran.
6. Berdasarkan hasil review secara periodik, dibutuhkan adanya Revisi Perjanjian Kinerja untuk menyesuaikan target baik kinerja maupun keuangan sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang.



# B A B III

## PENUTUP

### III.1 PENUTUP

#### III.1.1. Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Beberapa poin yang dapat disampaikan pada Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II Tahun 2022 ini, secara keseluruhan kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sudah baik. Dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK), Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2022, terdapat 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ( $SK \geq 100\%$ ) dan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan kurang dari 100% ( $0\% \leq IKP < 100\%$ ).
2. Berdasarkan hasil capaian kinerja triwulan II Tahun 2022, Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dari 9 IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdapat 4 (empat) IKK dengan status hijau dengan kondisi lebih besar atau sama dengan 100% ( $IKP \geq 100\%$ ) dan 5 (lima) status merah dengan kondisi kurang dari 100% ( $0\% \leq IKP < 100\%$ ). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### **Indikator Kinerja Kegiatan lebih besar atau sama dengan 100% ( $IKK \geq 100\%$ ):**

- 1) Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi terealisasi sebesar 104 lokasi (target tahun 2022 sebesar 104 lokasi), dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- 2) Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda terealisasi sebesar 11 lokasi (target tahun 2022 sebesar 11 lokasi), dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A terealisasi sebesar 98 (target tahun 2022 sebesar 80,5) dengan Capaian Kinerja sebesar 121,74%;
- 4) Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terealisasi sebesar 23,08% (target tahun 2022 sebesar 30%), dengan capaian kinerja sebesar 123,07%.



**Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%IKP<100%):**

- 1) Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan terealisasi 0,61 (target tahun 2022 sebesar 0,65), dengan capaian kinerja sebesar 93,85%;
- 2) Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A terealisasi sebesar 53,6% (target tahun 2022 sebesar 53,65 %), dengan capaian kinerja sebesar 99,91%;
- 3) Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A terealisasi 72,63 % (target tahun 2022 sebesar 74,15%), dengan capaian kinerja sebesar 97,95%;
- 4) Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat terealisasi sebesar 85 (target tahun 2022 sebesar 87), dengan capaian kinerja sebesar 97,70%;
- 5) Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terealisasi 71 (target tahun 2022 sebesar 72), dengan capaian kinerja sebesar 98,61%;
3. Terdapat perubahan pagu pada DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan TA. 2022 akibat adanya Revisi DIPA di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp.2.008.398.000,- dari Pagu Awal sebesar Rp 87.452.162.000,-. Sehingga Total Pagu akhir DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada Triwulan II TA. 2022 adalah sebesar Rp. 85.443.764.000,-.
4. Realisasi anggaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2022 pada Triwulan II adalah sebesar Rp. 32.413.234.987,- (37,94%);
5. Terdapat *automatical adjustment* I dan II dengan total sebesar Rp. 8.982.232.000,- pada triwulan II tahun 2022 yang masih dalam posisi *freeze*, sehingga dapat mempengaruhi prognosa akhir realisasi anggaran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.
6. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:
  - a. Monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
  - b. Melakukan langkah-langkah percepatan dalam rangka penyerapan realisasi anggaran;
  - c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
  - d. Memaksimalkan peran SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi demi tercapainya target capaian kinerja.



### III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

(1)	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN I			TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,65	0,65	0,61	93,85%	0,65	0,61	93,85%	BELUM TERCAPAI	Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan simpul prasarana transportasi jalan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan dan Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	104	104	104	100%	104	104	100%	TERCAPAI	Mengoptimalkan kegiatan operasional Terminal Penumpang Tipe A dan Terminal Barang untuk Umum melalui: 1. Konsistensi jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2022 masih sama dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 104 Terminal. 2. Menetapkan lokasi terminal tipe A dan Terminal Barang Untuk Umum baru sesuai dengan skala prioritas berdasarkan hasil pengkajian lebih lanjut; 3. Meningkatkan kegiatan monitoring operasional Terminal Penumpang Tipe A untuk memperluas cakupan pengawasan pada kegiatan pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A. 4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. 5. Mengoperasikan Terminal Barang Untuk Umum yang telah selesai dibangun meskipun kendaraan barang belum ada yang masuk terminal supaya bangunan tetap terawat dengan baik; 6. Tetap melanjutkan progres pembangunan Terminal Barang Untuk Umum sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015, akan tetapi karena terdapat keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan diprioritaskan pada Terminal Barang Untuk Umum yang memiliki permintaan/demand yang cukup besar. 7. Koordinasi dengan pihak terkait khususnya instansi yang membidangi Immigration, Customs, Quarantine and Security (ICQS) dikarenakan operasional Terminal Barang Untuk Umum yang menangani ekspor impor harus memiliki izin ICQS.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 3	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	Lokasi	11	11	8	72,73%	11	11	100%	BELUM TERCAPAI	1. Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; 2. Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN I			TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)		
												<p>prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional;</p> <p>3. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas.</p> <p>4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh BPTD.</p>			
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	80,5	80,5	80,55	100,06%	80,5	98	121,74%	TERCAPAI	<p>Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terkait pelayanan terminal melalui :</p> <p>1. Melakukan rekapitulasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan mengingatkan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A untuk selalu melakukan Survey IKM pada Aplikasi IKM IKP Ditjen Perhubungan Darat setiap bulannya.</p> <p>2. Tersedianya aplikasi Aplikasi 3A IPK-IKM untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi pelayanan yang dirasakan oleh pengguna jasa Terminal Tipe A.</p> <p>3. Perbaikan layanan antara lain perbaikan sarana dan prasarana;</p> <p>4. Mensosialisasikan informasi terkait prosedur layanan dan produk layanan yang ada secara bertahap serta penerapan pelayanan yang berkualitas pada pengguna jasa;</p>	Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,65	53,65	53,6	99,91%	53,65	53,6	99,91%	BELUM TERCAPAI	<p>Mengoptimalkan fasilitas yang ada pada Terminal Tipe A melalui :</p> <p>1. Melakukan rehabilitasi dan peningkatan Terminal Tipe A sebanyak mungkin agar standar terminal bisa merata;</p> <p>2. Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis ataupun Training kepada Satuan Pelayanan Terminal;</p> <p>3. Melaksanakan kegiatan pelayanan prima pada Terminal</p> <p>4. Melakukan evaluasi paruh waktu renstra.</p>	Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	74,15	74,15	72,63	97,95%	74,15	72,63	97,95%	BELUM TERCAPAI	<p>Meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal meliputi:</p> <p>1. Menerapkan Terminal Online System (TOS) pada seluruh Terminal Tipe A;</p> <p>2. Melakukan peningkatan SDM melalui training dan Bimtek terkait Terminal Online System (TOS);</p> <p>3. Menambah biaya operasional pada satuan pelayanan untuk mendukung terlaksananya smart terminal sehingga persentase penerapan smart terminal dapat meningkat.</p>	Subdit Terminal Angkutan Jalan



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN I			TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)
4	SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	%	30	30	22,01	126,63%	30	23,08	123,07%	TERCAPAI	Mengoptimalkan penurunan persentase pelanggaran angkutan barang pada UPPKB dengan cara : 1. Melakukan penyusunan <i>Road Map</i> operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM) 2. Membuat <i>outlook</i> UPPKB 3. Membuat Pedoman Teknis WIM 4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB 5. Melakukan Pemeliharaan JTO 6. Melakukan Revisi Perdirjen SK.736 7. Pengadaan WIM di UPPKB Ajibarang dan Balonggandu	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
5	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	87	87	82,2	94,48%	87	85	97,70%	BELUM TERCAPAI	Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan dukungan teknis transportasi darat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan cara: 1. Pada aspek perencanaan akan melaksanakan penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan secara tepat waktu; 2. Pada aspek kepegawaian, melakukan <i>updating</i> sistem kepegawaian, membuat laporan bulanan kinerja pegawai setiap bulan melalui AP2Kp, dan membuat penilaian kinerja pegawai setiap akhir tahun. 3. Pada aspek keuangan, melakukan pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan rapat Kemajuan Realisasi Kegiatan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang rutin dilaksanakan pada hari senin.	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepengusahaan Prasarana, Subbag Tata Usaha
5	SK1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	72	72	71	98,61%	72	71	98,61%	BELUM TERCAPAI	Mengoptimalkan kegiatan layanan perkantoran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, meliputi: 1. Terdapat pengadaan PC dan Printer pada Tahun Anggaran 2022; 2. Menambah kecepatan jaringan internet untuk memudahkan kegiatan layanan perkantoran.	Subbag Tata Usaha

# LAMPIRAN



**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN  
TAHUN 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	SK.1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	<b>0,67</b>
		IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	<b>111</b>
		IKK 3	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	lokasi	<b>15</b>
2	SK.2 Meningkatkan Kinerja pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	Indeks (%)	<b>80,50</b>
		IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Rasio (%)	<b>53,65</b>
		IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	Rasio (%)	<b>74,15</b>
3	SK.3 Meningkatkan keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Rasio (%)	<b>30</b>
4	SK.5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	<b>87</b>
5	SK.1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	<b>72</b>

Jakarta, 3 Januari 2022

**DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

**Ir. M. POPIK MONTANASYAH., M.T.**

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19630910 199203 1 003



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

# PERJANJIAN KINERJA

**2022**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. M. POPIK MONTANASYAH., M.T.**

Jabatan : **DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**

Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Januari 2022

**Pihak Kedua**

**Pihak Pertama**

**Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**

**Ir. M. POPIK MONTANASYAH., M.T.**

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19630910 199203 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	
1	SK.1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,65
		IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	104
		IKK 3	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	11
2	SK.2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	Indeks (%)	80,50
		IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Rasio (%)	53,65
		IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	Rasio (%)	74,15
3	SK.3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Rasio (%)	30
4	SK.5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	87
5	SK.1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	72

**Kegiatan**

**Anggaran**

1. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	21.300.000.000
2. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	9.400.000.000
3. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	29.533.358.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	27.218.804.000

Disetujui

Jakarta, Januari 2022

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT**

**DIREKTUR PRASARANA  
TRANSPORTASI JALAN**



**Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**



**Ir. M. POPIK MONTANASYAH., M.T.**

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19630910 199203 1 003



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

SARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)
Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,65	Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan;	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,65	0,65	0,65	0,65	403.500.000	Subdit TAJ Subdit Faspim
	IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	104	Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	610.300.000	Subdit TAJ
	IKK Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	11	1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 2. Survey dan Monitoring Simpul-Simpul Transportasi di KSPN 3. Survey Inventarisasi dan Pendataan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan; 4. Mandalika	8	8	8	8	8	8	8	11	11	11	11	11	749.999.000	Subdit Faspim
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	Indeks (%)	80,5	Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	-	Subdit TAJ
	IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Rasio (%)	53,65	1. Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Kebumen (termasuk supervisi) 2. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Operasional Terminal Angkutan Jalan	53,65	53,65	53,65	53,65	53,65	53,65	53,65	53,65	53,65	53,65	53,65	53,65	20.557.340.000	Subdit TAJ
	IKK Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	Rasio (%)	74,15	Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan dan Terminal Online Sistem (TOS)	74,15	74,15	74,15	74,15	74,15	74,15	74,15	74,15	74,15	74,15	74,15	74,15	250.000.000	Subdit TAJ
Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Rasio (%)	30	1. Pengawasan kendaraan angkutan barang di UPPKB dengan menggunakan aplikasi JTO (dilaksanakan oleh BPTD); 2. Pengadaan weigh-in-motion (WIM) di UPPKB Ajibarang dan UPPKB Balonggandu; 3. Pelaksanaan sistem manajemen mutu UPPKB (ISO 9001:2015); 4. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor. 5. Kerjasama Pengelolaan UPPKB dengan Pihak Kedua	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	32.047.245.000	Subdit PKB
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	87	1. Fasilitas Rest Area pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2022 dan Nataru; 2. Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor 6. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 7. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor 8. Pendampingan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu UPPKB 9. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 10. Inhouse Consultant Penyusunan Bahan Pimpinan 11. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan 12. Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Angkutan Jalan 13. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan 14. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda 15. Sosialisasi Peraturan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda 16. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda 17. Survey dan Monitoring Fasilitas Rest Area pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2023 18. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasakan 19. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta 20. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyajian dan Transaksi KPBU Prasarana Transportasi Jalan 21. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan 22. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri 23. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi 24. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAAL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022 25. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan 26. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait 27. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor 28. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	26.614.974.000	Subdit TAJ Subdit PKB Subdit Faspim Subdit KP Subbag Tata Usaha
Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat	Nilai	72	1. Tanpa Sub Komponen (Layanan Perkantoran) 2. Tanpa Sub Komponen (Pengadaan Belanja Modal Lainnya)	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	6.218.804.000	Subbag Tata Usaha

Jakarta, Januari 2022

DIREKTOR PRASARANA TRANSPORTASI

  
Ir. M. POPIK MONTANASYAH, M.T.  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196309 0 199203 1 003

**MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2022**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-1				REALISASI BULAN-1				% CAPAIAN BULAN-1				TARGET BULAN-2				REALISASI BULAN-2				% CAPAIAN BULAN-2				TARGET BULAN-3				REALISASI BULAN-3				% CAPAIAN BULAN-3				EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA	Volume	%	REALISASI KINERJA	Volume	%	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	TARGET KINERJA	Volume	%	REALISASI KINERJA	Volume	%	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	TARGET KINERJA	Volume	%	REALISASI KINERJA	Volume	%	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN															
								(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)													
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	Rasio	0,65	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan;	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	0,65	403,500,000	0,61	0	93,85%	0	0,65	403,500,000	0,61	0	93,85%	0	0,65	403,500,000	0,67%	185,843,474	93,85%	46,00%	BELUM TERCAPAI	Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan antarmoda transportasi jalan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan dan Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda																			
		SK2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	104	Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A;	104	104	610,300,000	104	0	100,00%	0	104	610,300,000	104	0	100,00%	0	104	610,300,000	0,70%	52,980,000	100,00%	8,68%	TERCAPAI	Kebijakan terhadap operasional Terminal Penumpang Tipe A yaitu konsistensi jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2022 sama dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe A dan Terminal Barang untuk Umum yang beroperasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 104 Terminal.	Subdit Terminal Angkutan Jalan																		
		SK3	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	lokasi	11	1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 2. Survey dan Monitoring Simpul-Simpul Transportasi di KSP; 3. Survey, Inventarisasi dan Rendaman Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan; 4. Mandelika	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	11	11	749,999,000	8	0	72,73%	0	11	749,999,000	8	0	72,73%	0	11	749,999,000	0,86%	48,722,000	72,73%	6,50%	BELUM TERCAPAI	1. Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; 2. Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional; 3. Pengaturan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terrealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh BPTD.	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda																	
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	80,5	Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	80,5	80,5	-	80,55	0	100,00%	0	80,5	-	80,55	0	100,00%	0	80,5	-	80,55	100,00%	-	TERCAPAI	Melakukan rekapitulasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan mengoptimalkan Sektornya Pelayanan Terminal Tipe A untuk selalu melakukan Survey IMI pada Aplikasi SIM IAP (Jalan Perhubungan Darat setiap bulannya).	Subdit Terminal Angkutan Jalan																		
		SK2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,65	1. Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Kibumen (termasuk legendaris); 2. Evaluasi, Pengembangan, dan Pemeliharaan Kinerja dan Operasional Terminal Angkutan Jalan	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	53,65	53,65	20,557,340,000	53,6	0	99,91%	0	53,65	20,557,340,000	53,6	0	99,91%	0	53,65	20,557,340,000	23,51%	53,6	7,023,748,578	99,91%	34,17%	BELUM TERCAPAI	Mengoptimalkan fasilitas yang ada pada Terminal Tipe A	Subdit Terminal Angkutan Jalan																
		SK3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	74,15	Berlangkapan Teknis Pengabdian Terminal Angkutan Jalan dan Terminal Online Sistem (TOS)	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	74,15	74,15	250,000,000	72,63	0	97,95%	0	74,15	250,000,000	72,63	0	97,95%	0	74,15	250,000,000	0,29%	72,63	-	97,95%	0,00%	BELUM TERCAPAI	Meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi	Subdit Terminal Angkutan Jalan																
3	SK3	Meningkatnya Keandalan Transportasi Darat	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	30	1. Pengawasan kendaraan angkutan berat di UPPKB dengan menggunakan aplikasi JTD (dikembangkan oleh BPTD); 2. Pengabdian weigh-in-motion (WIM) di UPPKB Albarang dan UPPKB Balongandui; 3. Pelebaran sistem manajemen lalu UPPKB (DQ 9002-2001); 4. Monitoring, Evaluasi, dan Pemeliharaan Kinerja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor; 5. Kegiatan Pengabdian UPPKB dengan Pihak Kedua	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	30	30	32,047,245,000	20,29	0	132,37	0	30	32,047,245,000	20,56	0	131,47	0	30	32,047,245,000	36,65%	22,01	3,105,558,685	73,37%	9,69%	TERCAPAI	Mengoptimalkan penurunan persentase pelanggaran angkutan barang pada UPPKB dengan cara : 1. Melakukan pemantauan Road Map operasional UPPKB (Pemertanian WIM); 2. Membuat outlook UPPKB; 3. Membuat Pedoman Teknis WIM; 4. Membuat Pedoman Teknis Rencana Bangun UPPKB; 5. Melakukan Pemertanian JTD; 6. Melakukan Revisi Pedoman SK-736; 7. Pengabdian WIM di UPPKB Albarang dan Balongandui	Subdit Perencanaan Kendaraan Bermotor																
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	87	1. Fasilitas Road Area pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2022 dan "Rahang"; 2. Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana; 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Perencanaan Kendaraan Bermotor	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	87	87	26,614,974,000	76,2	0	87,59	0	87	26,614,974,000	76,2	0	87,59%	0	87	26,614,974,000	30,43%	82,2	877,364,340	94,48%	3,30%	BELUM TERCAPAI	Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan dukungan teknis transportasi darat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Perimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan																
5	SK1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemeliharaan yang Baik	Tingkat Penyelenggaraan Perawatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	72	1. Tanpa Sub Komponen (Layanan Revisorasi); 2. Tanpa Sub Komponen (Pengabdian Belajar Modul Lainnya)	Tingkat Penyelenggaraan Perawatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	72	72	6,218,804,000	71	0	98,61	0	72	6,218,804,000	71	0	98,61%	0	72	6,218,804,000	7,11%	71	1,141,784,043	98,61%	18,36%	BELUM TERCAPAI	Mengoptimalkan kegiatan layanan perawatan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subbag Tata Usaha																

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-4			REALISASI BULAN-4			% CAPAIAN BULAN-4			TARGET BULAN-5			REALISASI BULAN-5			% CAPAIAN BULAN-5			TARGET BULAN-6	REALISASI BULAN-6			% CAPAIAN BULAN-6			EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN ANGGARAN									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
1	SK1	Meningkatnya Keefektifan Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	RK.1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,65	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan;	0,65	0,65	403,500,000	0,61	185,843,474,00	93,85%	0	0,65	403,500,000	0,61	185,843,474,00	93,85%	0	0,65	403,500,000	0,46%	0,61	163,100,962	93,85%	0	40,42%	BELUM TERCAPAI	Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan jasa prasarana transportasi jalan.	Subdi Terminal Angkutan Jalan dan Subdi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda				
			RK.2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	104	Monitoring Operasional Terminal Perumpong Tipe A	104	104	610,300,000	104	52,980,000,00	100,00%	0	104	610,300,000	104	52,980,000,00	100,00%	0	104	610,300,000	0,70%	104	52,980,000	100,00%	8,66%	TERCAPAI	Kehadiran terhadap operasional Terminal Perumpong Tipe A yang konsisten jumlah Terminal Perumpong Tipe A yang beroperasi tahun 2022 sama dengan jumlah Terminal Perumpong Tipe A dan Terminal Barang Untuk Umum yang beroperasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 104 Terminal.	Subdi Terminal Angkutan Jalan					
			RK.3	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	lokasi	11	1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda 2. Survey dan Monitoring Simpul-Simpul Transportasi di SPN 3. Survey Inventarisasi dan Perbaikan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan, 4. Mandatika	11	11	749,999,000	9	48,722,000,00	81,82%	0	11	749,999,000	9	48,722,000,00	81,82%	0	11	749,999,000	0,86%	11	187,267,740	100,00%	24,97%	TERCAPAI	1. Memeyan reguler untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; 2. Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional; 3. Pengawasan konduktif terhadap jalak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terrealisasi sesuai dengan target dan tidak terganggu; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh BPTD.	Subdi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda					
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	RK.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	80,5	Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A	80,5	80,5	-	96,88	120,35%	0	80,5	-	98,64	122,53%	0	80,5	-	98	-	121,74%	-	98	-	121,74%	-	TERCAPAI	Melakukan rekapitulasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan menggalakan Survei Pelayanan Terminal Tipe A untuk selalu melakukan Survey DMH pada Aplikasi DMH IDP Digen Perhubungan Darat setiap bulannya.	Subdi Terminal Angkutan Jalan				
			RK.2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,65	1. Revisifikasi Terminal Perumpong Tipe A Kabupaten (termasuk kawasan) 2. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Operasional Terminal Angkutan Jalan	53,65	53,65	20,557,340,000	53,6	7,021,746,578,00	99,91%	0	53,65	20,557,340,000	53,6	7,021,746,578,00	99,91%	0	53,65	20,557,340,000	23,51%	53,6	18,446,321,018	99,91%	94,99%	BELUM TERCAPAI	Mengoptimalkan fasilitas yang ada pada Terminal Tipe A	Subdi Terminal Angkutan Jalan					
			RK.3	Persentase Penerapan Smart Terminal Tipe A	%	74,15	Bimbingan Teknis Pengembangan Terminal Angkutan Jalan dan Terminal Online Sistem (TOS)	74,15	74,15	250,000,000	72,63	-	97,95%	0	74,15	250,000,000	72,63	-	97,95%	0	74,15	250,000,000	0,29%	72,63	112,604,512	97,95%	45,04%	BELUM TERCAPAI	Meningkatkan operasional Terminal Perumpong Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal.	Subdi Terminal Angkutan Jalan					
3	SK3	Meningkatnya Keamananan Transportasi Darat	RK.1	Persentase Pelanggaran pada UPPK Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	30	1. Pengawasan kendaraan angkutan barang di UPPK dengan menggunakan aplikasi JTO (dikembangkan oleh BPTD) 2. Pengadaan weigh-in-motion (WIM) di UPPK Alabang dan UPPK Balonggandu; 3. Pelebaran sistem manajemen masa UPPK (DPO 9000-2001); 4. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pembangunan Kendaraan Bermotor; 5. Kegiatan Pengabdian UPPK dengan Pihak Kedua	30	30	32,047,245,000	23,76	3,105,558,685,00	120,80%	0	30	32,047,245,000	24,79	3,105,558,685,00	117,37%	0	30	32,047,245,000	36,65%	23,08	3,184,565,285	123,07%	9,94%	TERCAPAI	Mengoptimalkan penuruan persentase pelanggaran angkutan barang pada UPPK dengan cara : 1. Melakukan penuruan Road Map operasional UPPK (Pemerintah WIM) 2. Membuat outlook UPPK 3. Membuat Pedoman Teknis WIM 4. Membuat Pedoman Teknis Rencana Bangun UPPK 5. Melakukan Pemeliharaan JTO 6. Melakukan Test Pedoman SK-736 7. Pengadaan WIM di UPPK Alabang dan Balonggandu	Subdi Perencanaan dan Pengembangan Kendaraan Bermotor					
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	RK.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	87	1. Fasilitas Rest Area pada masa Aplikasi Laboran Tahun 2022 dan Nalanc 2. Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana 3. Bimbingan Teknis Pengawasan Alat Perbaikan Kendaraan Bermotor	87	87	26,614,974,000	82,2	877,394,340,00	87,59	0	87	26,614,974,000	82,2	877,394,340,00	94,48%	0	87	26,614,974,000	30,43%	85	7,344,819,333	97,70%	27,60%	BELUM TERCAPAI	Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan dukungan teknis transportasi darat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subdi Terminal Angkutan Jalan, Subdi Perencanaan dan Pengembangan Kendaraan Bermotor, Subdi Fasilitas Pendukung dan					
5	SK1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	RK.1	Tingkat Penyelenggaraan Perencanaan dan Pelaksanaan Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	72	1. Tanya Sisa Komponen Layanan Perkaratoran 2. Tanya Sisa Komponen Pengabdian Belajar Model Lainnya	72	72	6,218,804,000	71	1,141,794,043,00	98,61	0	72	6,218,804,000	71	1,141,794,043,00	98,61%	0	72	6,218,804,000	7,11%	71	2,035,180,629	98,61%	32,73%	BELUM TERCAPAI	Mengoptimalkan kegiatan layanan perkaratoran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subdi Tata Usaha					

IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL			FASILITAS PRASARANA TRANSPORTASI JALAN						
			Terminal Tipe-A	Terminal Barang	Jumlah KSN yang terlayani Terminal	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	Jumlah KSN yang terlayani FASPIM	Kawasan yang terlayani PTJ (Irisan Terminal & Faspim)	
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	1	1	KSPN Danau Toba				Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Danau Toba (TA. 2022)	1	1
	2	2	KSPN Tanjung Kelayang						
	3	3	KSPN Borobudur	1. Terminal Purworejo 2. Terminal Tidar		1	1. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Magelang (TA. 2020) 2. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Purworejo (TA. 2020) 3. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Klaten (TA. 2020) 4. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Salatiga (TA. 2020) 5. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Surakarta (TA. 2020)	1	1
	4	4	KSPN Bromo Tengger Semeru	3. Terminal Pandaan Pasuruan 4. Terminal Banyuwangga - Kota Probolinggo		1			1
	5	5	KSPN Mandalika	5. Terminal Mandalika - Kota Mataram		1	1. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Mandalika (dilaksanakan oleh BPTD Tahun 2021) 2. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Mandalika (dilaksanakan oleh BPTD untuk mendukung penyelenggaraan Moto GP)	1	1
	6	6	KSPN Lab Bajo						
	7	7	KSPN Likupang	6. Terminal Liwas		1			1
	8	8	KSPN Wakatobi						
	9	9	KSPN Morotai						
	10	10	KSPN Raja Ampat						
9 Kawasan Industri (di luar Jawa)	11	1	KI Sei Mangkei						
	12	2	KI Galang Batang						
	13	3	KI Bintang Aerospace						
	14	4	KI Sadai						
	15	5	KI Ketapang						
	16	6	KI Surya Borneo						
	17	7	KI Palu	7. Terminal Mamboro, Kota Palu		1			1
	18	8	KI Teluk Weda						
	19	9	KI Teluk Bintuni						

IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL			FASILITAS					
			PRASARANA TRANSPORTASI JALAN					
			Terminal Tipe-A	Terminal Barang	Jumlah KSN yang terlayani Terminal	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	Jumlah KSN yang terlayani FASPIM	Kawasan yang terlayani PTJ (Irisan Terminal & Faspim)
8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	20	1	KPBPB Sabang					
	21	2	KEK Arun Lhokseumawe	8. Terminal Paya Ilang, Kota Lhokseumawe		1		1
	22	3	KPBPB Batam Bintang Karimun					
	23	4	KEK Tanjung Lesung	9. Terminal Labuan, Kab. Pandeglang		1		1
	24	5	KEK Mandalika*					
	25	6	KEK MBTK	10. Terminal Samarinda Seberang, Kota Samarinda	1. TBI Entikong - Prov. Kalbar	1		1
	26	7	KEK Bitung	11. Terminal Tangkoko, Kota Bitung		1		1
	27	8	KEK Morotai					
	28	1	Banda Aceh	12. Terminal Batoh, Kota Banda Aceh		1		1
	29	2	Mebidangrov (Medan dsk)	13. Terminal Amplas, Kota Medan 14. Terminal Pinang Baris, Kota Medan		1		1
	30	3	Padang dsk	15. Terminal Anak Air, Kota Padang		1		1
	31	4	Pekanbaru	16. Terminal Bandaraya Payung Sekaki, Kota Pekanbaru		1	Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kota Pekanbaru (dilaksanakan oleh BPTD Tahun 2021)	1
	32	5	Dumai	17. Terminal Dumai, Kota Dumai		1		1
	33	6	Batam					
	34	7	Jambi	18. Terminal Alam Barajo, Kota Jambi		1		1
	35	8	Pelembang dsk	19. Terminal Alang-alang Lebar, Kota Palembang, 20. Terminal Karya Jaya, Kota Palembang		1	Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Palembang (TA. 2020)	1
	36	9	Bengkulu	21. Terminal Air Sebakul		1		1
	37	10	Pangkal Pinang					
	38	11	Bandar Lampung	22. Terminal Rajabasa, Kota Bandar Lampung		1		1
	39	12	Jabodetabek	23. Terminal Kampung Rambutan, Kota Jakarta Timur 24. Terminal Kalideres, Kota Jakarta Barat 25. Terminal Baranangsiang, Kota Bogor 26. Terminal Jatijajar, Kota Depok 27. Terminal Induk Bekasi, Kota Bekasi 28. Terminal Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan 29. Terminal Poris Plawad, Kota Tangerang		1		1
40	13	Serang	30. Terminal Pakupatan, Kota Serang		1		1	

IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL			FASILITAS						
			PRASARANA TRANSPORTASI JALAN						
			Terminal Tipe-A	Terminal Barang	Jumlah KSN yang terlayani Terminal	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	Jumlah KSN yang terlayani FASPIM	Kawasan yang terlayani PTJ (Irisan Terminal & Faspim)	
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	41	14	Cilegon	31. Terminal Merak, Kab. Cilegon		1		1	
	42	15	Bandung Raya	32. Terminal Cicaheum, Kota Bandung 33. Terminal Leuwi Panjang, Kota Bandung		1		1	
	43	16	Cirebon	34. Terminal Harjamukti, Kota Cirebon		1		1	
	44	17	Surakarta	35. Terminal Tirtanadi, Kota Solo		1	Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Surakarta (TA. 2020)	1	
	45	18	Kedungsepur (Semarang dsk)	36. Terminal Mangkang, Kota Semarang 37. Terminal Bawen, Kab. Semarang 38. Terminal Tingkir, Kota Salatiga		1		1	
	46	19	Cilacap	39. Terminal Bangga Mbangun Desa		1		1	
	47	20	Yogyakarta	40. Terminal Giwangan		1		1	
	48	21	Gerbangkertosusilo (Surabaya dsk)	41. Terminal Osowilangun, Kota Surabaya 42. Terminal Purabaya, Kab. Sidoarjo		1		1	
	49	22	Malang	43. Terminal Arjosari, Kota Malang		1		1	
	50	23	Sarbagita	44. Terminal Mengwi, Kab. Badung		1	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Angkutan Perkotaan Skema Buy The Service di Denpasar (dukungan G20 TA. 2022)	1	
	51	24	Mataram Raya	Terminal Mandalika - Kota Mataram		1		1	
	52	25	Kupang	45. Terminal Bimoku	2. TBI Motamasin - Prov. NTT, 3. TBI Wini - Prov. NTT		1		1
	53	26	Pontianak						
	54	27	Palangkaraya	46. Terminal W.A Gara		1		1	
	55	28	Banjarmasin dsk						
	56	29	Balikpapan-Samarinda-Bontang	47. Terminal Batu Ampar, Kota Balikpapan 48. Terminal Samarinda Seberang, Kota Samarinda		1		1	
	57	30	Tarakan						
	58	31	Gorontalo	49. Terminal Isimu, Kab. Gorontalo 50. Terminal Duingi, Kota Gorontalo		1		1	
	59	32	Manado	Terminal Liwas		1		1	
	60	33	Bitung	Terminal Tangkoko		1		1	
61	34	Palu	Terminal Mamboro		1		1		
62	35	Maminasata (Makassar dsk)	51. Terminal Daya, Kota Makassar		1		1		
63	36	Kendari	52. Terminal Puuwatu, Kota Kendari		1		1		
64	37	Ambon							
65	38	Ternate							

## IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL			FASILITAS					
			PRASARANA TRANSPORTASI JALAN					
			Terminal Tipe-A	Terminal Barang	Jumlah KSN yang terlayani Terminal	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	Jumlah KSN yang terlayani FASPIM	Kawasan yang terlayani PTJ (Irisan Terminal & Faspim)
66	39	Sorong						
67	40	Timika						
68	41	Jayapura	53. Terminal Entrop, Kota Jayapura		1			1
69	42	Merauke						
					41		7	42

\*untuk lokasi yang tidak ada nomor = 1 terminal melayani 2 kawasan

$$\text{Realisasi (Rasio)} = \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional s.d tahun(n)}(10 \text{ DPP, } 9 \text{ KI, } 8 \text{ KEK, } 42 \text{ PKN}) \text{ yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan}}{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional (10 DPP, } 9 \text{ KI, } 8 \text{ KEK, } 42 \text{ PKN) yang ditetapkan}}$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \quad \text{Capaian Rasio Konektivitas} = \frac{42 \text{ wilayah (irisan simpul TTA \& faspim yang terlayani)}}{69 \text{ wilayah KSN}} = 0,61$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,61}{0,65} \times 100\% = 93,85\%$$

Jumlah Kawasan yang terlayani Terminal	Jumlah KSN yg terlayani Terminal Tipe A / Jumlah KSN (10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN = 69 Wilayah)	41
Rasio Kawasan yang terlayani terminal		0.59
Jumlah Kawasan yang terlayani Faspim	Jumlah KSN yg terlayani Faspim / Jumlah KSN (10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN = 69 Wilayah)	7
Rasio Kawasan yang terlayani Faspim		0.10
Jumlah Kawasan yang terlayani PTJ (Irisan)	Jumlah KSN terlayani Simpul Prasarana Transportasi Jalan / Jumlah KSN (10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN = 69 Wilayah)	42
Rasio Kawasan yang terlayani PTJ (Irisan)		0.61

## **IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi**

Berdasarkan data Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada target renstra tahun 2022, terdapat 104 lokasi terminal yang beroperasi dimana target tersebut telah terpenuhi pada tahun 2022, sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 telah sesuai dengan target renstra dan target PK Tahun 2022.

Berikut ini adalah daftar Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi berdasarkan target PK pada Tahun 2022 dan hasil dari kegiatan monitoring operasional Terminal Penumpang Tipe A:

1. Terminal Langsa
2. Terminal Lhokseumawe
3. Terminal Meulaboh
4. Terminal Batoh
5. Terminal Paya Ilang
6. Terminal Tanjung Pinggir
7. Terminal Madya Tarutung
8. Terminal Sibolga
9. Terminal Amplas
10. Terminal Pinang Baris
11. Terminal Anak Air
12. Terminal Kiliran Jao
13. Terminal Bareh Solok
14. Terminal Simpang Aur
15. Terminal Jati Pariaman
16. Terminal Bangkinang
17. Terminal Payung Sekaki
18. Terminal Dumai
19. Terminal Alam Barajo
20. Terminal Muara Bungo
21. Terminal Pulau Tujuh Bangko
22. Terminal Sribulan
23. Terminal Alang-Alang Lebar
24. Terminal Kayuagung
25. Terminal Batu Kuning
26. Terminal Betung
27. Terminal Karya Jaya
28. Terminal Simpang Periuk
29. Terminal Batay
30. Terminal Simpang Nangka
31. Terminal Rajabasa

32. Terminal Pakupatan
33. Terminal Labuan
34. Terminal Mandala Lebak
35. Terminal Merak
36. Terminal KH. Ahmad Sanusi
37. Terminal Ciakar
38. Terminal Guntur Melati Garut
39. Terminal Harjamukti
40. Terminal Indihiang
41. Terminal Kertawangunan
42. Terminal Subang
43. Terminal Banjar
44. Terminal Cikampek
45. Terminal Leuwipanjang
46. Terminal Purworejo
47. Terminal Cepu
48. Terminal Bangsa Mbangun Desa
49. Terminal Giri Adipura
50. Terminal Ir. Soekarno
51. Terminal Kebumen
52. Terminal Mangkang
53. Terminal Pekalongan
54. Terminal Induk Pemalang
55. Terminal Bulupitu Purwokerto
56. Terminal Mendolo
57. Terminal Bawen
58. Terminal Tidar
59. Terminal Tingkir
60. Terminal Tirtonadi
61. Terminal Jati
62. Terminal Bobot Sari
63. Terminal Tegal
64. Terminal Jepara
65. Terminal Giwangan
66. Terminal Dhaksinarga
67. Terminal Arjosari
68. Terminal Arya Wiraraja
69. Terminal Banyuwangga
70. Terminal Gayatri
71. Terminal Kertonegoro
72. Terminal Pacitan
73. Terminal Patria
74. Terminal Purboyo
75. Terminal Selo Aji

76. Terminal Tamanan
77. Terminal Tawangalun
78. Terminal Surodakan
79. Terminal Rajekwesi
80. Terminal Pandaan Pasuruan
81. Terminal Kambang Putih
82. Terminal Mengwi
83. Terminal Mandalika
84. Terminal Sumer Payung
85. Terminal Dara
86. Terminal Sei Ambawang
87. Terminal W.A. Gara
88. Terminal Gambut Barakat
89. Terminal Batu Ampar
90. Terminal Samarinda Seberang
91. Terminal Induk Lumpue
92. Terminal Latenri Sessu Pekkae
93. Terminal Petta Pongawai
94. Terminal Simbuang
95. Terminal Tipalayo
96. Terminal Kasintuwu
97. Terminal Mamboro
98. Terminal Boroko
99. Terminal Tangkoko
100. Terminal Puuwatu
101. Terminal Isimu
102. Terminal Duingingi
103. Terminal Entrop
104. Terminal Entikong

Sehingga:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah TTA \& TB yang beroperasi} \\ & = \text{Jumlah TTA yang Beroperasi} + \text{Jumlah TB yang beroperasi} = 104 \end{aligned}$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi Triwulan I Tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{104}{104} \times 100\% = 100\%$$

## **IKK Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda**

Terdapat penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda di **Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Nasional** dengan target penyediaan fasilitas pendukung sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sebanyak **11 lokasi** dan **terrealisasi** sebanyak **11 (Sebelas) lokasi** dengan rincian Realisasi sebagai berikut :

1. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika dan Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika (mendukung penyelenggaraan Moto GP);
2. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Magelang;
3. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Purworejo;
4. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Surakarta;
5. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Klaten;
6. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Salatiga;
7. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Palembang;
8. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kota Pekanbaru.
9. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba;
10. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur;
11. Pembangunan Fasilitas Pendukung pada Angkutan Perkotaan Skema *Buy The Service* di Denpasar (mendukung G20).

Dari **11 (sebelas)** lokasi target penyediaan fasilitas pendukung, terdapat **11 (sebelas)** lokasi sudah terealisasi yang berada di **7 Kawasan Strategis Nasional**.

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja dapat disimpulkan bahwa target perjanjian kinerja tahun 2022 ada sebanyak 11 lokasi dengan realisasinya sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 9 Lokasi.

Sehingga:

*Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda = Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda yang terbangun pada lokasi KSN Th 2020 s.d Th 2022 = 11 lokasi*

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Triwulan II tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$$

## IKK Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL			FASILITAS		
			PRASARANA TRANSPORTASI JALAN		
			Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	Jumlah KSN yang terlayani FASPIM	
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	1	1	KSPN Danau Toba	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Danau Toba (TA. 2022)	1
	2	2	KSPN Tanjung Kelayang		
	3	3	KSPN Borobudur	1. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Magelang (TA. 2020) 2. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Purworejo (TA. 2020) 3. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Klaten (TA. 2020) 4. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Salatiga (TA. 2020) 5. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Surakarta (TA. 2020)	1
	4	4	KSPN Bromo Tengger Semeru		
	5	5	KSPN Mandalika	1. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Mandalika (dilaksanakan oleh BPTD Tahun 2021) 2. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Mandalika (dilaksanakan oleh BPTD untuk mendukung penyelenggaraan Moto GP)	1
	6	6	KSPN Lab Bajo		
	7	7	KSPN Likupang		
	8	8	KSPN Wakatobi		
	9	9	KSPN Morotai		
	10	10	KSPN Raja Ampat		
9 Kawasan Industri (di luar Jawa)	11	1	KI Sei Mangkei		
	12	2	KI Galang Batang		
	13	3	KI Bintang Aerospace		
	14	4	KI Sadai		
	15	5	KI Ketapang		
	16	6	KI Surya Borneo		
	17	7	KI Palu		
	18	8	KI Teluk Weda		
	19	9	KI Teluk Bintuni		
: (KEK)	20	1	KPBPB Sabang		
	21	2	KEK Arun Lhokseumawe		
	22	3	KPBPB Batam Bintan Karimun		
	23	4	KEK Tanjung Lesung		

## IKK Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL			FASILITAS		
			PRASARANA TRANSPORTASI JALAN		
			Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	Jumlah KSN yang terlayani FASPIM	
8 Kawasan Ekonomi Khusus	24	5	KEK Mandalika*		
	25	6	KEK MBTK		
	26	7	KEK Bitung		
	27	8	KEK Morotai		
	28	1	Banda Aceh		
	29	2	Mebidangrov (Medan dsk)		
	30	3	Padang dsk		
	31	4	Pekanbaru	Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kota Pekanbaru (dilaksanakan oleh BPTD Tahun 2021)	1
15 Kawasan Industri	32	5	Dumai		
	33	6	Batam		
	34	7	Jambi		
	35	8	Pelembang dsk	Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Palembang (TA. 2020)	1
	36	9	Bengkulu		
	37	10	Pangkal Pinang		
	38	11	Bandar Lampung		
	39	12	Jabodetabek		
	40	13	Serang		
	41	14	Cilegon		
	42	15	Bandung Raya		
	43	16	Cirebon		

## IKK Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL			FASILITAS		
			PRASARANA TRANSPORTASI JALAN		
			Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	Jumlah KSN yang terlayani FASPIM	
Pusat Kegiatan Nasional (P)	44	17	Surakarta	Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Surakarta (TA. 2020)	1
	45	18	Kedungsepur (Semarang dsk)		
	46	19	Ciitacap		
	47	20	Yogyakarta		
	48	21	Gerbangkertosusilo (Surabaya dsk)		
	49	22	Malang		
	50	23	Sarbagita	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Angkutan Perkotaan Skema Buy The Service di Denpasar (dukungan G20 TA. 2022)	1
	51	24	Mataram Raya		
	52	25	Kupang		
	53	26	Pontianak		
	54	27	Palangkaraya		
	55	28	Banjarmasin dsk		
	56	29	Balikpapan-Samarinda-Bontang		
	57	30	Tarakan		
	58	31	Gorontalo		
	59	32	Manado		
	60	33	Bitung		
	61	34	Palu		
	62	35	Maminasata (Makassar dsk)		
	63	36	Kendari		
	64	37	Ambon		
	65	38	Ternate		
	66	39	Sorong		
	67	40	Timika		
68	41	Jayapura			
69	42	Merauke			



SATUAN KERJA	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
Satpel TTA Leuwi Panjang			77.5									
Kayuagung			70									
Surodakan			81.25									
Liwas												
Simpang Nangka			77.5									
Kiliran Jao			73.75									
Induk Lumpue						91,43						
Jati												
Lebak												
Ciakar												
Tidar												
Batu Kuning			86.88									
Pakupatan												
Tangkoko												
Labuan												
Arya Wiraraja												
Payung Sekaki												
Tipalayo												
Induk Pemalang												
Bobot Sari												
Karya Jaya												
Lahat												
Purwokerto			88.75									
Bangga Bangun Desa												
Pekalongan												
TTM												
Tirtonadi												
Dumai												
Botoh												
Rajabasa												
Kayu Agung												
Merak												
Banjar												
Giawangan												
Mendolo												
Wa Gara												
Latenri Sessu Pakkae												
Baroko												
<b>TOTAL</b>	<b>80.55</b>	<b>80.55</b>	<b>80.55</b>	<b>96.88</b>	<b>98.64</b>	<b>98.00</b>						

## IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A

**Tabel Matriks Penilaian (SPMTn) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015**

Matriks Penilaian (SPMTn) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:		
NO	ASPEK PENGUKURAN	NILAI (POINT)
<b>ASPEK PELAYANAN KESELAMATAN (AP<sub>keselamatan</sub>)</b>		
1	<b>Lajur Pejalan Kaki</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lajur pejalan kaki yang meminimalkan <i>crossing</i> dengan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	<b>Fasilitas Keselamatan Jalan</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, penerangan jalan umum, pagar). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	<b>Jalur Evakuasi</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
4	<b>Alat Pemadam Kebakaran</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia alat pemadam kebakaran. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
5	<b>Pos, fasilitas dan petugas kesehatan</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas kesehatan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
6	<b>Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
7	<b>Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
8	<b>Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan)</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
9	<b>Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	<b>Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
<b>ASPEK PELAYANAN KEAMANAN (AP<sub>keamanan</sub>)</b>		
1	<b>Fasilitas pencegah tindak kriminal</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas pencegah tindak kriminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	<b>Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat.</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	<b>Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2

<b>ASPEK PELAYANAN KEANDALAN/KETERATURAN (AP<sub>keandalan</sub>)</b>		
1	<p><b>Ketersediaan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis.</b>            Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
2	<p><b>Keteraturan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis</b>            Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.</p>	2
3	<p><b>Ketersediaan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis.</b>            Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
4	<p><b>Keteraturan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis.</b>            Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.</p>	2
5	<p><b>Ketersediaan Loket tempat calon penumpang membeli tiket</b>            Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Loket tempat calon penumpang membeli tiket. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	1
6	<p><b>Keteraturan Loket tempat calon penumpang membeli tiket</b>            Nilai 1 (satu) point apabila Loket tempat calon penumpang membeli tiket teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.</p>	1
7	<p><b>Ketersediaan Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal.</b>            Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
8	<p><b>Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai).</b>            Nilai 2 (dua) point apabila Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai) sesuai. Nilai 0 (nol) apabila tidak sesuai.</p>	2
9	<p><b>Ketersediaan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal.</b>            Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
10	<p><b>Keteraturan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal.</b>            Nilai 2 (dua) point apabila Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.</p>	2
<b>ASPEK PELAYANAN KENYAMANAN (AP<sub>kenyamanan</sub>)</b>		
1	<p><b>Ketersediaan tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka)            Dukungan pembaca layar diaktifkan.</b></p>	2

	<p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka) Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	
2	<p><b>Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal.</b> Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak bersih.</p>	2
3	<p><b>Keteraturan di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona)</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.</p>	2
4	<p><b>Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel).</b> Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
5	<p><b>Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas. 2 wastafel).</b> Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas. 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
6	<p><b>Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal)</b> Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
7	<p><b>Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas)</b> Nilai 2 (dua) point apabila Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
8	<p><b>Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas)</b> Nilai 2 (dua) point apabila Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
9	<p><b>Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal</b> Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
10	<p><b>Ketersediaan alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau.</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	1
11	<p><b>Tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	1
12	<p><b>Kondisi ruang terbuka hijau, Tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah.</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	1
13	<p><b>Ketersediaan Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
14	<p><b>Ketersediaan Fasilitas dan petugas kebersihan</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas dan petugas kebersihan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
15	<p><b>Ketersediaan Tempat istirahat awak kendaraan</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Tempat istirahat awak kendaraan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
16	<p><b>Ketersediaan Area merokok (smoking area)</b></p>	2

	Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area merokok (smoking area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	
17	<b>Ketersediaan Drainase yang memadai</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Drainase yang memadai. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
18	<b>Ketersediaan Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area)</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
19	<b>Ketersediaan Ruang baca (reading corner)</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang baca (reading corner). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
20	<b>Tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi</b> Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
<b>ASPEK PELAYANAN KEMUDAHAN/KETERJANGKAUAN (AP<sub>kemudahan</sub>)</b>		
1	<b>Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur</b> Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
2	<b>Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang</b> Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpisah.	1
3	<b>Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain</b> Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
4	<b>Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur</b> Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
5	<b>Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang</b> Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
6	<b>Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain</b> Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
7	<b>Visual Informasi Pelayanan, antara lain : Denah/Layout terminal, Nomor trayek, nama PO dan Kelas Pelayanannya, Nama terminal keberangkatan, Jadwal, tarif dan Peta Jaringan. (Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk dan di tuang tunggu umum, mudah dilihat dan jelas terbaca)</b> Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
8	<b>Audio informasi pelayanan, antara lain : informasi pelayanan dan Kejadian khusus dan gangguan. Diletakkan ditempat yang mudah didengar oleh pengguna jasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada</b> Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
9	<b>Informasi angkutan lanjutan yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat: Jenis angkutan, Lokasi angkutan, Jam pelayanan angkutan lanjutan, Jurusan/rute, Tarif. Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca.</b> Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	<b>Informasi gangguan perjalanan mobil bus diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada</b>	2

	Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	
11	<b>Ketersediaan Tempat penitipan barang</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	<b>Ketersediaan Fasilitas pengisian baterai (charging corner)</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	<b>Aksesibilitas Tempat naik / turun penumpang Memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus.</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
14	<b>Ketersediaan Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
<b>ASPEK PELAYANAN KESETARAAN (AP<sub>kesetaraan</sub>)</b>		
1	<b>Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel)</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
2	<b>Ketersediaan Ruang ibu menyusui</b> Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang ibu menyusui. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
<b>Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terminal</b>		100

Sehingga :

SPM TTA

$$= \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

$$IKK_n = \frac{\sum SP_{T1} + SP_{T2} + \dots + SP_{Tn}}{n}$$

**Note:**

- \*Monitoring dilaksanakan pada saat Proses rehabilitasi selesai dilaksanakan pada tahun (n)
- SPM TTA = Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan (SP) pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A (TTA) yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- n = Jumlah Terminal yang beroperasi

$$\% \text{ Capaian} = 53,6 / 53,65 \times 100\% = 99,91\%$$

## IKK Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A

Untuk menghitung IKK Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A digunakan rumus sebagai berikut:

$$\%Penerapan\ Smart\ Terminal = \left[ \frac{\text{Jumlah TTA Yang Melaporkan Operasional Secara Online}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 74\% \right] + \left[ \frac{\text{Jumlah terminal dipasang mesin check in ticket dan passenger gate}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 8,4\% \right] + \left[ \frac{\text{Jumlah terminal dipasang vehicle gate, digital information, cctv}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 17,6\% \right]$$

Sehingga:

$$\begin{aligned} \%Penerapan\ Smart\ Terminal &= \left[ \frac{\text{Jumlah TTA Yang Melaporkan Operasional Secara Online}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 74\% \right] + \left[ \frac{\text{Jumlah terminal dipasang mesin check in ticket dan passenger gate}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 8,4\% \right] \\ &+ \left[ \frac{\text{Jumlah terminal dipasang vehicle gate, digital information, cctv}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 17,6\% \right] \\ &= \left[ \frac{99}{103} \times 74\% \right] + \left[ \frac{8}{103} \times 8,4\% \right] + \left[ \frac{5}{103} \times 17,6\% \right] \\ &= 72,63\% \end{aligned}$$

Keterangan:

Penerapan Smart Terminal dibagi menjadi 3 bagian, antara lain :

1. Persentase dari Jumlah Terminal Tipe A Yang Melaporkan Operasional Secara Online dengan bobot 74%
2. Persentase dari Jumlah terminal dipasang mesin check in ticket dan passenger gate dengan bobot 8,4%
3. Persentase dari Jumlah terminal dipasang vehicle gate, digital information dan CCTV dengan bobot 17,6%

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A pada Triwulan I tahun 2022 terhadap target PK Tahun 2022 yaitu sebesar:

$$\% Capaian = \frac{72,63}{74,15} \times 100\% = 97,95\%$$

## IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Berdasarkan rekapitulasi Laporan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang pada UPPKB sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Triwulan	Masuk UPPKB	Tidak Melanggar	Melanggar	Persentase Pelanggaran
Triwulan I	158.108	123.314	34.794	22,01%
Triwulan II	170.139	130.863	39.276	23,08%

Berdasarkan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Triwulan II tahun 2022 diperoleh 23,08%, sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 telah melebihi target renstra dan target PK Tahun 2022.

Sehingga realisasi persentase pada triwulan II Tahun 2022 yaitu:

$$IKK = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah Kendaraan yang masuk UPPKB}} \times 100\% = \frac{39276}{170139} \times 100\% = 23,08\%$$

\*semakin rendah persentase pelanggaran, semakin baik, semakin tinggi persentase pelanggaran, semakin buruk

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Triwulan II tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{30 - (23,08 - 30)}{30} \times 100\% = 123,07\%$$

IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
			<b>JANUARI</b>
<b>A</b>	<b>Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan</b>	<b>35%</b>	
1	<b>SAKIP</b>	20%	
a	Rencana Strategis (Renstra)	4	4
	Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤ 60 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 61-90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
b	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selesai >30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (maksimal 1 Desember)		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 1-30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (2-31		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai ≥1 hari setelah Awal Tahun Anggaran (≥1 Januari)		
c	Perjanjian Kinerja (PK)	3	3
	Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20		
d	Rencana Aksi (Renaksi)	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20		
e	Input Aplikasi e-Performance	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I, II, III	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20		
g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	4	4
	Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤25 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 2 (dua) selesai 25-55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 1 (satu) selesai >55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
2	<b>Input Aplikasi e-Planning</b>	15%	
a	Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan	5	4
b	Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif	5	4
c	Input Aplikasi e-Planning Pagu Definitif	5	4
<b>B</b>	<b>Indeks Profesionalisme ASN</b>	<b>35%</b>	
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	8,5	8,5
2	Kompetensi	14	14
3	Kinerja	11	11
4	Disiplin	1,5	1,5
<b>C</b>	<b>Tingkat Pengelolaan Keuangan</b>	<b>30%</b>	
1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10	5
	Nilai 10 (sepuluh) apabila status excellent atau capaian daya serap ≥100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila status on-track atau capaian daya serap 80,1% sampai dengan 99,99%		
	Nilai 6 (enam) apabila status warning atau capaian daya serap 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 5 (lima) apabila status alert atau capaian daya serap di bawah 60%		
2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10	4
	Nilai 10 (sepuluh) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 6 (enam) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
	Nilai 4 (empat) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
	Nilai 2 (dua) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) di bawah 20%		
3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	10	10

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
			JANUARI
	<i>Nilai 10 (sepuluh) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 80,1% sampai dengan 100%</i>		
	<i>Nilai 8 (delapan) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 60,1% sampai dengan 80%</i>		
	<i>Nilai 6 (enam) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 40,1% sampai dengan 60%</i>		
	<i>Nilai 4 (empat) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 20,1% sampai dengan 40%</i>		
	<i>Nilai 2 (dua) apabila Persentase TL Tuntas di bawah 20%</i>		
			85

IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

NO	URAIAN	BOBOT	HASIL PERHITUNGAN	NILAI					
<b>A</b>	<b>Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV</b>	<b>25%</b>			JAN	FEB	MAR	APR	MEI
1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon II	10%	70.0	7.00	7.00	7.00	7.00		
2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	8%	70.0	5.60	5.60	5.60	5.60		
3	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	7%	70.0	4.90	4.90	4.90	4.90		
<b>B</b>	<b>Tingkat Kepuasan Staf</b>	<b>25%</b>	<b>70.0</b>	<b>17.50</b>	17.50	17.50	17.50		
<b>C</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran</b>	<b>50%</b>							
1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20%	110.47	22.09	22.09	22.09	22.09		
2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15%	46.51	6.98	6.98	6.98	6.98		
3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15%	46.2	6.93	6.93	6.93	6.93		
<b>TOTAL NILAI</b>				<b>71.00</b>	<b>71.00</b>	<b>71.00</b>	<b>71.00</b>		

**LAMPIRAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN :**

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia
2. PM 102 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Terminal Barang;
3. KP 75 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum dan Terminal Transit Penumpang di Entikong Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
4. KM 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Nanga Badau yang Berlokasi di Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
5. KM 45 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Aruk yang Berlokasi di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dan;
6. KM 139 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum yang Berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua.
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional dan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024.
10. PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
12. Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan;
13. PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

Peraturan ini dapat di download melalui <https://intip.in/DasarHukumDPTJLMCKTW12022>